



MINGGU III OKTOBER 2023

• TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 •

info indonesia

Harga @ Rp 20.000,-



Road to
Election
2024

GIBRAN JADI REBUTAN

CAWAPRES
PILIHAN
PRABOWO
GIBRAN ATAU
ERICK THOHIR

KADER
GERINDRA
INGINKAN
GIBRAN JADI
PENDAMPING
PRABOWO

JOKOWI-MEGA
RENGGANG
GEGARA
GIBRAN DAN
KAESANG

MAHFUD
LENGKAPI
PERAN
GANJAR

HERMAN DERU
- MAWARDI
YAHYA MAJU
LAGI DI PILGUB
SUMSEL 2024

GOLKAR
GABUNG
PDIP
TERGANTUNG
PERINTAH
JOKOWI

KPU ABAIKAN
PUTUSAN MA
HASIL PEMILU
RAWAN
SENGKETA

“Ada baiknya jika dalam Pilpres 2024 ini, pasangan capres-cawapresnya juga diikuti perwakilan dari kalangan dunia usaha. Sehingga pemulihan dan pertumbuhan perekonomian yang saat ini sudah berjalan dengan baik, bisa terus terpelihara”

Bambang Soesatyo



Menunggu Jawaban

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden menjadi hal yang paling ditunggu seluruh kader partai. Batasan usia lebih krusial pada ambang minimal karena banyak kepentingan politik yang bergantung padanya.

Dari hasil keputusan itu, tentu sosok paling terpengaruh dari keputusan MK itu adalah Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo yang tak lain putra sulung Presiden Joko Widodo. Dari banyak calon wakil presiden yang hadir di tingkat elit politik, nama Gibran Rakabuming kini paling menonjol.

Kader Partai Gerindra kini secara terang-terangan ingin mengusung Gibran Rakabuming sebagai pendamping Prabowo Subianto. Meski mereka tahu Gibran adalah kader PDIP yang mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Soal konsekuensi yang harus dihadapi, para kader terlihat tidak mau pusing karena mereka menilai Gibran Rakabuming lebih pas mendampingi Prabowo daripada Erick Thohir atau nama-nama lainnya.

Secara politik, Gibran bisa dinilai anak kemarin sore. Namun itulah kelebihanannya karena dosanya juga dianggap lebih sedikit dibanding politisi atau calon-calon lainnya. Sehingga polesannya tidak terlalu sulit bila dibandingkan sosok yang lain.

Dari kubu PDIP, koalisi pendukung Ganjar Pranowo juga mulai terasa panas. Ada beberapa nama yang muncul ke permukaan seperti Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa yang semuanya dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

Sekali lagi kader NU memang tidak bisa lepas dari politik demokrasi Indonesia. Secara ketokohan kedua calon ini juga cukup kuat.

Meski demikian, baik Prabowo dan Ganjar, hingga kini belum mengumumkan siapa cawapres pilihannya. Namun, semua juga sudah bisa menebak ke mana arah telunjuk mereka berlabuh.

Di sisi lain, munculnya nama Gibran Rakabuming di kubu Prabowo makin memperlihatkan posisi Joko Widodo di Pilpres 2024. Walaupun masih tercatat sebagai kader PDIP, namun Jokowi juga menunjukkan eksistensi dan posisi politiknya.

Setelah Kaesang memilih jalan sebagai Ketua Umum PSI dan Gibran kemungkinan jadi cawapres Prabowo Subianto, hal seperti menjadi sebuah tamparan bagi PDIP di Pemilu 2024.

Selain itu juga membuktikan kalau regenerasi di tubuh PDIP tidak berjalan karena masih didominasi politisi-politisi tua yang masih ingin terus berkuasa.

Ada banyak informasi menarik lainnya yang kami sajikan di edisi ini. Antara lain hiruk pikuk elit politik terkait pencapresan tidak berpengaruh kuat di daerah. Dominasi koalisi dinilai tidak berpengaruh kuat di pemilihan legislatif.

Bagaimana gambaran kekuatan politik di daerah, bisa dibaca pada rubrik Info Dapil. Bagi caleg, ketokohan seseoranglah yang memengaruhi masyarakat untuk memilih mereka.

Di sisi lain, situasi politik saat ini dianggap lebih kondusif daripada sebelumnya. Situasi ini juga menjadi harapan semua masyarakat, terutama dari kalangan pengusaha.

Mereka berharap siapapun presiden terpilih yang terpenting bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. •



info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI

INFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung PT. DUA SATU PRO
Sertifikat Dewan Pers
Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022

PENDIRI/ DIREKTUR : Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzanl Khan PEMIMPIN REDAKSI: Rusdiyono WAKIL PIMPINAN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irmayani REDAKTUR: Rio Taufiq Adam, Fonda Lapod, Rusdy Setiawan Putra, Irmayani, Rusdiyono, Nina

Erlina REPORTER: Nefri, Indra Hadi, Pahmi Ramadhan, Moehamad Moeslim, Sadam M, Hardi Aar, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Andyanto,

M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles TATA LETAK: Sujatmiko MEDIA SOSIAL: Haidir Ali

KEUANGAN : Dra Hj Nurkhamida SEKRETARIS REDAKSI: Nur Aisah PENGEMBANGAN BISNIS: M. Iqbal, Zul Fahmi ADMINISTRASI:

Ega Tri Gustina DISTRIBUSI: Abdul Muchtar

HARGA IKLAN: 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %.

1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-

BANK ACCOUNT: *A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur ALAMAT REDAKSI/IKLAN/

PEMASARAN: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750 TELP 021-

791 96781 FAX 021-791 96786 PALEMBANG Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I

Palembang 30126 TELP : 0711-7442344



“Tentunya menjadi beban moral bagi Cak Imin untuk meyakinkan kiai-kiai sepuh di NU dengan menjadi cawapres Anies”

Hari Purwanto

CAK IMIN CUCI DOSA ANIES

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, nampaknya tengah berusaha membangun citra baru untuk Anies Baswedan setelah menerima pinangan sebagai calon wakil presiden. Cak Imin dirasa perlu untuk membersihkan masa lalu Anies yang lekat dengan politik identitas yang bertolak belakang dengan warga Nahdlatul Ulama (NU).

Baru-baru ini, Cak Imin menceritakan bahwa dirinya sempat beberapa kali berkunjung ke pondok pesantren untuk menjelaskan terkait ideologi Anies Baswedan.

Dia juga beberapa kali menemui para kiai untuk memberikan penjelasan terkait isu yang menyatakan bahwa Anies Baswedan merupakan sosok yang memiliki paham Islam radikal.

“Makanya saya akhir-akhir ini sibuk nemui kiai-kiai ke pesantren-pesantren untuk menjelaskan bahwa Mas Anies bukan radikal. Kalau mau jujur, Anies Baswedan itu liberal,” kata Cak Imin di acara Temu Juang Aktivis Jojakarta untuk AMIN di Univesity Club UGM Sleman, DIY, Rabu, 11 Oktober 2023.

Cak Imin juga berseloroh bahwa yang seharusnya menjadi calon presiden adalah dirinya, bukan Anies Baswedan. Sebab, Anies Baswedan tidak memiliki kendaraan politik atau partai politik. Di samping itu, soal usia, Cak Imin lebih tua jika dibandingkan dengan Anies Baswedan.

“Dwitunggal itu penting, karena seharusnya usia Mas Anies lebih muda dari saya. Harusnya saya yang capres. Kedua, saya punya partai, Mas Anies enggak punya partai,” kata Cak Imin.

Dia menyebutkan bahwa musuh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi ketidakberdayaan. Selain itu, selalu hanya berkutat pada persoalan yang sama pada setiap pergantian pemerintahan.

“Musuh kita hari ini satu, stagnasi, kemandekan, kejumudan, dan ketidakberdayaan,” kata Cak Imin.

Dia menyampaikan, dalam membangun bangsa ini harus dari hal yang kecil. Hal itu pernah Cak Imin lakukan ketika masuk dalam lingkaran kekuasaan era Susilo Bambang Yudhoyono (ABY).

“Istilah NU-nya itu kira-kira Ma La Yudraku Kulluhu La Yutraku Kulluhu. Wes gak iso maksimal, yo minimal ada yang dilakukan.

Bahasa gampangnya itu kira-kira lek gak iso akeh, setitik-titik gak opo lah sing penting mlaku. Jadi targetnya minimalis,” ujar Cak Imin.

Kendati begitu, jika kelak AMIN pada 2024 berhasil merebut kekuasaan dari Presiden Jokowi, Cak Imin ingin pemerintahannya nanti memiliki target yang besar untuk negeri ini.

“Saya ingin Anies-Muhaimmin (di Pilpres 2024) AMIN ini tidak punya target minimalis, maksimalis,” jelas Cak Imin.

Direktur Eksekutif Studi Demokrat Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menyatakan, duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar merupakan pasangan yang diusung untuk kepentingan dari Surya Paloh.

“Cak Imin diminta menjadi cawapres Anies tentunya memiliki maksud dan tujuan. Salah satu sosok yang meminta Cak Imin menjadi cawapres Anies adalah Surya Paloh (SP),” ujar Hari.

Hari menjelaskan, Surya Paloh memilih Anies Baswedan sebagai capres karena Partai NasDem ingin mencuci badan Anies ketika menjadi gubernur DKI Jakarta.

“Langkah Surya Paloh menduetkan Anies dengan Cak Imin tentunya ada per-

hitungan tersendiri. Selain mendulang suara untuk Partai Nasdem, tetapi juga bagian dari cuci badan Anies yang telah menjadikannya gubernur DKI Jakarta,” kata Hari.

Dia menilai, pada Pilgub DKI Jakarta 2017, Anies Baswedan mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok garis keras.

“Jika kita mundur ke belakang saat Pilgub DKI 2017, Anies didukung oleh kelompok radikal di tataran bawah. Mayoritas warga NU terbelah dan menilai Anies lebih melekat dengan kelompok radikal,” ucap Hari.

Menurutnya, persepsi yang terbangun itu akan memberikan dampak negatif bagi duet Anies Baswedan dan Cak Imin. Dia menuturkan, Cak Imin sebagai pasangannya, mau tidak mau harus turun tangan untuk menghilangkan persepsi yang melekat kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

“Tentunya menjadi beban moral bagi Cak Imin untuk meyakinkan kiai-kiai sepuh di NU dengan menjadi cawapres Anies,” kata Hari.

Dia mengatakan, jalan Cak Imin untuk membersihkan nama Anies Baswedan itu tidaklah mudah. Sebab, pada Pilgub DKI Jakarta, Anies Baswedan dianggap sebagai pemain politik identitas.

“Tentunya tidak mudah jalan Cak Imin dengan pa-

sangannya dan Anies sangat membutuhkan untuk cuci badan atas jejak rekamnya selama ini yang identik dengan politik identitas dan paham radikalisme,” terang Hari.

Selain itu, kata Hari, Anies Baswedan juga sangat dekat dengan kelompok liberal. Sebab, Anies pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat. Namun, Hari tidak heran dengan keputusan Cak Imin yang menerima pinangan dari Surya Paloh untuk bisa berpasangan dengan Anies Baswedan. Dia menyebut, Cak Imin juga memiliki kepentingan dengan Anies Baswedan.

“Dengan Cak Imin menyetujui berpasangan dengan Anies tentunya ada simbiosis mutualisme dan kesepakatan yang dibangun. Komitmen antara Anies dan Cak Imin tentunya ada pihak ketiga yang menjadi jembatan di antara mereka,” jelas Hari.

Dia mengatakan, dalam politik tidak ada yang gratis dan harus saling menguntungkan. Dia menyebut,

duet Anies Baswedan dan Cak Imin didasari kepentingan yang sama.

“Rekam jejak Anies dan Cak Imin bisa dilihat ke belakang karena sejalan beriringan didasari atas kepentingan dan kebutuhan. Kalau mau tahu perilaku politik seseorang, lihat masa lalunya,” tandas Hari.

•RDO





CAWAPRES PILIHAN PRABOWO GIBRAN ATAU ERICK THOHIR

Kesan “ngebet” Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi RI 1 diasosiasikan lewat dukungan Presiden Joko Widodo yang makin menunjukkan tanda-tanda nyata dalam proses pencalonannya sebagai presiden hasil Pilpres 2024, baik dari pesan tersirat maupun keterlibatan anak-anaknya dalam politik, hingga pengujian Pasal 169 huruf q di UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden.

Hingga beberapa hari jelang pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 19 Oktober 2023, Prabowo masih belum menentukan sosok cawapres yang akan mendampinginya berlaga di Pilpres 2024. Padahal, setumpuk nama sudah berada di meja kerjanya, baik yang mempunyai latar belakang pengusaha, politisi ulung yang pernah jadi menteri ataupun kepala daerah, hingga putra Jokowi.

Sebut saja ada nama Erick Thohir yang punya background pengusaha dan menjabat Menteri BUMN. Selain itu, ada nama Gubernur Jawa Timur yang pernah menjadi Menteri Ketenagakerjaan, Khofifah Indar Parawansa, dan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat Walikota Solo, masuk radar cawapres terkuat yang akan dipilih Prabowo.

Tetapi belakangan hari ini, nama Gibran disebut-sebut yang paling berpeluang ditetapkan sebagai cawapres oleh Prabowo, karena terdapat uji materiil syarat batas usia minimum capres-cawapres yang

termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, akan diputus Mahkamah Konstitusi (MK) pada 16 Oktober 2023.

Ketua MK yang dijabat adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, juga menjadi faktor yang akan mewujudkan kecurigaan masyarakat menjadi kenyataan. Yaitu, putusan gugatan uji materiil norma batas usia minimum capres-cawapres yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dan Partai Garuda yang dipimpin adik politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, Ahmad Ridha Sabana, diduga akan dikabulkan dan membuat minimal usia capres-cawapres menjadi 35 tahun dari sebelumnya 40 tahun.

Menguatnya dugaan itu juga dibarengi dengan proses pembuatan peraturan teknis pencalonan presiden dan wakil presiden oleh KPU, yang mana hingga hari ini PKPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden belum mendapat penomoran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Padahal, beleid itu telah ditandatangani Ketua KPU, Hasyim Asyari, sejak 9 Oktober 2023.

Prabowo yang seolah terpasung dengan manuver Presiden Jokowi mempertahankan kekuasaannya melalui suksesi penyerahan tongkat kepemimpinan kepadanya yang nampak nyata tersebut, juga dikarenakan mantan Danjen Kopassus itu kepincut basis suara relawan Jokowi yang mengakar di masyarakat.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, menganalisa, hasrat Prabowo memenangkan Pilpres 2024 memang tidak bisa dibendung lagi, sehingga

Jokowi yang juga menginginkan tampuk kepemimpinan tetap digenggamannya dengan memberikan basis kekuatan politiknya. Apalagi, melihat posisinya sekarang ini disodorkan sosok cawapres dari dagingnya sendiri dan akan didaftarkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) ke KPU.

“Gibran ini adalah asosiasi murni, baik secara biologis maupun ideologis, dari Presiden Jokowi. Artinya arah dukungan Gibran itu juga preferensi politik bapaknya. Dengan demikian, siapapun capres yang bisa menggaet putra Jokowi, maka tentu akan dipersepsi publik mendapat dukungan Presiden Jokowi. Dan jika putusan MK memang membolehkan usia 35 tahun untuk jadi cawapres, dan Presiden Jokowi merestui Gibran bersama Prabowo, tentu ini jalan tol untuk melanjutkan legacy yang sudah dibuat Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir ini,” ujar Subiran kepada Info Indonesia, Kamis, 12 Oktober 2023.

Menurut magister komunikasi politik lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu, usia Gibran yang masih muda, yakni 35 tahun, menjadi wapres akan menjadi batu lompatan untuk menjadi presiden ke depan. Dengan demikian, Subiran menganggap akan semakin tersistematislah pola keberlanjutan visi Indonesia Emas 2045 yang dibangun Presiden Jokowi.

“Apalagi 2044 Gibran itu telah memasuki usia matang yakni 55 tahun. Kalau dalilnya adalah demi bangsa dan negara, demi keberlanjutan program dan visi misi Indonesia Emas 2045, maka tentu menjadikan Gibran sebagai cawapres Prabowo mendapatkan afirmasi positif,” tuturnya.

Namun di sisi yang lain, Subiran memandang jika keputusan Prabowo adalah meminang Gibran menjadi cawapres, maka pasangan ini menjadi bukti nyata rekonsiliasi politik Pilpres 2014, 2019 dan 2024 antara Presiden Jokowi dan Prabowo.

“Jika Gibran menjadi cawapres Prabowo, maka ini adalah bukti nyata bahwa dalam politik itu tidak ada kawan sejati dan tidak ada musuh abadi. Dahulu Prabowo adalah rival bebuyutan Presiden Jokowi dan sekarang adalah sahabat loyal dari Presiden Jokowi. Dan menjadikan Gibran sebagai cawapres memiliki tiga keuntungan elektoral, yakni basis suara Presiden Jokowi, Jawa Tengah, dan kaum muda (gen Z dan Milenial) yang jumlahnya 56 persen dalam DPT,” urainya.

Meski begitu, Subiran yang juga mendirikan Lembaga Pendidikan Bernama Sekolah Peradaban memperkirakan munculnya beberapa efek negatif jika Gibran menerima lamaran Prabowo sebagai cawapres. Salah satunya, dia akan dicap sebagai pengkhianat tubuh PDIP. Sehingga hal itu akan menjadi catatan sejarah keluarga Presiden Jokowi yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga besar partai banteng yang membesarkan namanya, mulai dari Wali Kota Solo dua periode, Gubernur DKI satu periode dan presiden dua periode.

“Gibran juga akan dilabeli karbitan dan pragmatis dalam meniti karir politik, karena mengandalkan privilese sebagai anak Presiden. Akan muncul stigma bahwa Presiden Jokowi menggunakan politik dinasti untuk melanggengkan kekuasaan dan cita-cita politiknya, Indonesia Emas 2045. Akan menjadi preseden buruk bagi kaderisasi kepemimpinan nasional dengan menggunakan pola politik dinasti yang sudah dikritik di zaman orde baru,” paparnya.

Sementara jika dibandingkan dengan Erick Thohir yang menurut hasil survei Poltracking Indonesia lebih mendongkrak suara Prabowo ketimbang Gibran, menurut Subiran juga kurang berdasar. Sebabnya, Menteri BUMN itu salah satu anak buah Presiden Jokowi yang hanya punya popularitas dan elektabilitas moncer, tetapi sumbernya dari elektoral Presiden Jokowi.

“Artinya dibanding Erick Thohir, Gibran lebih mewakili basis relawan dan basis elektoral Jokowi ketimbang Erick Thohir. Sebab Gibran adalah asosiasi murni baik secara biologis maupun ideologis dari Presiden Jokowi. Sedangkan Erick Thohir hanya anak buah dari Presiden Jokowi,” tandasnya. ●RDO





“Peluangnya mungkin saja besar jika dalam rangka melengkapi kekurangan Ganjar, apalagi konteksnya ini berbicara mengenai dampak elektoral karena Ganjar secara kalkulasi politik tidak menguasai Jawa Timur”

Herry Mendrofa

MAHFUD LENGKAPI PERAN GANJAR

**Sosok calon wakil presiden yang akan menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 semakin mengerucut. Je-
lang pendaftaran capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 19-25 Oktober 2023, nama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, terus disebut sebagai calon kuat untuk Ganjar.**

Peluang Mahfud untuk mendampingi Ganjar semakin terbuka karena dalam beberapa hasil survey, dirinya menjadi kandidat terkuat sebagai cawapres mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Sejumlah pihak juga menilai peluang Mahfud mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 cukup besar karena PDIP saat ini membutuhkan dukungan dari kelompok NU untuk bersaing dengan lawan politiknya.

Pengamat politik, Herry Mendrofa, menilai, peluang Mahfud MD untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 cukup besar. Hal itu tak terlepas dari manuver Mahfud yang cukup ramai menjadi sorotan publik atas keberaniannya menjadi pengkritik meski saat ini berada di internal pemerintahan Presiden Jokowi.

Herry juga menyebut mantan Ketua MK itu cukup memiliki pengaruh suara di Jawa Timur sebagai basis NU.

“Peluangnya mungkin saja besar jika dalam rangka melengkapi kekurangan Ganjar, apalagi konteksnya ini berbicara mengenai dampak elektoral karena Ganjar secara kalkulasi politik tidak menguasai Jawa Timur dan juga suara segmen religius,” ungkap Herry, Kamis, 12 Oktober 2023.

“Peluang besar atau

tidaknya harus dilihat juga bahwa kompetitornya siapa. Misalnya Prabowo menggan-
geng siapa. Nah ini juga harus dilihat. Jika Prabowo menggandeng figur yang NU juga kan kalkulasinya berimbang,” sambung Herry.

Herry menilai, Mahfud bisa jadi energi pelengkap Ganjar dalam bersaing di Pilpres 2024. Bila Mahfud terpilih menjadi pendamping Ganjar, maka akan mempengaruhi elektabilitas PDIP pada Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) itu mengatakan, hadirnya Mahfud sebagai pendamping Ganjar juga dapat menambah ceruk dukungan elektoral PDIP yang dikenal nasionalis, menjadi nasionalis-agamis. Sebab, latar belakang Mahfud sebagai representasi kaum santri juga dapat mempengaruhi persepsi publik dalam melihat duet itu.

Selain itu, Mahfud sejauh ini cukup sering disebut sebagai manifestasi tokoh yang dianggap memiliki pengaruh suara warga NU.

Kendati demikian, Herry melihat, jika Mahfud MD resmi dipinang Ganjar, juga bisa menjadi salah satu strategi bagi PDIP untuk merebut suara NU dari tangan Cak Imin yang selama ini juga cukup dikenal sebagai tokoh Nahdliyin.

Herry menambahkan, dengan masuknya Mahfud jadi cawapres, maka akan memiliki potensi mendongkrak tingkat elektabilitas suara Ganjar dan mengubah dukungan warga NU di Pemilu 2024.

“Sudah jelas pasti terbelah, di koalisi PDIP saja sudah ada PPP yang memiliki basis pemilih tradisional yang berasal dari kalangan NU, maka dengan adanya Mahfud MD, saya kira juga akan mengubah konstelasi di NU,” ujar Herry. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, memandang, masuknya Mahfud menjadi kandidat cawapres Ganjar tidak terlepas dari hasil survei terkait elektabilitasnya yang cukup besar. Mah-

fud juga memiliki peluang yang besar mendorong elektabilitas Ganjar pada Pilpres 2024.

Kendati demikian, Fernando mengaku cukup ragu jika posisi Mahfud menjadi cawapres Ganjar dapat menarik suara warga NU. Menurut Fernando, saat ini, warga NU juga telah memiliki pilihan lain terkait kandidat pemimpin di Pilpres 2024.

Kondisi itu dapat dibenarkan seiring pernyataan dari Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, yang menyebut organisasi yang dipimpinnya tidak memberikan instruksi untuk mendukung siapapun di Pilpres 2024 dan membebaskan warga NU menggunakan hak pilihnya sendiri.

“Namun, saya ragu Mahfud MD nantinya akan memberikan dampak kepada PDIP apabila dipasangkan dengan Ganjar karena pemilih Mahfud sudah memiliki pilihan partai politik,” ungkap Fernando.

Faktor lain yang menjadi keraguan Fernando yakni pernyataan mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj pada Pilpres 2019 yang menyebut bahwa Mahfud bukan kader NU.

“Pada Pilpres 2019 sempat ramai juga diperbincangkan bahwa Mahfud MD bukan lagi bagian dari NU. Ketua Umum PBNU pada saat itu, Said Aqil menyatakan bahwa Mahfud MD bukan kader NU,” terang Fernando.

Berdasarkan kondisi itulah, menurut Fernando akan menyulitkan harapan PDIP untuk menarik suara NU pada Pilpres 2024. Jika ingin menarik simpatik pemilih berlatar

belakang NU, sebaiknya Ganjar mendukung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

“Kalau PDIP ingin mengharapkan suara dari warga NU, sebaiknya mengambil cawapres yang benar-benar merepresentasikan NU, seperti Khofifah Indar Parawansa,” jelas Fernando.

Fernando menuturkan, Mahfud MD sejauh ini tidak akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam membantu mendongkrak perolehan suara apabila dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Terlebih saat ini, PDIP dan Ganjar juga melirik suara dari Jawa Timur.

Menurut Fernando, meski Mahfud sosok yang berasal dari Jawa Timur, namun dirinya tidak mampu menggaet dukungan suara dari provinsi tersebut lantaran merupakan basis dari Khofifah Indar Parawansa.

“Mahfud MD yang merupakan putra Jawa Timur tidak bisa mendapatkan dukungan suara secara maksimal dari warga Jawa Timur,” jelasnya.

Fernando melihat, Jawa Timur merupakan area pertarungan dari seluruh bakal capres yang bakal maju di Pemilu 2024. Oleh karena itu, PDIP sebaiknya mencari strategi lain agar dapat merebut dukungan dari warga Jawa Timur.

“Jawa Timur menjadi wilayah dari pertarungan antara Ganjar dan Prabowo karena Jawa Barat saat ini menjadi salah satu basis pendukung Prabowo. Sedangkan, Ganjar mengharapkan Jawa Tengah yang menjadi basis dukungan untuk dirinya pada pilpres yang akan datang,” ujar Fernando.

Fernando menambahkan, mendekati kegiatan pendaftaran capres dan cawapres, baik PDIP maupun Prabowo tentu saat ini sedang sibuk berhitung kekuatan mengenai siapakah sosok yang menjadi cawapresnya, termasuk berburu dukungan dari Jawa Timur dan warga NU.

“PDIP dan seluruh partai politik yang tergabung sebagai pendukung Ganjar Pranowo tentu masih terus melakukan kalkulasi terkait siapakah sosok yang tepat menjadi cawapres pendamping Ganjar,” ungkap Fernando.

“Peluang seluruh nama yang selama ini juga dipertimbangkan menjadi cawapres Ganjar masih sama sampai diputuskan dan diumumkan satu nama. Termasuk peluang Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa yang selama ini disebut dipertimbangkan menjadi cawapres Ganjar,” pungkasnya. ●RDO





Lolly Suhenty

PENGAWASAN MELEKAT PENDAFTARAN CAPRES

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan akan mengawasi secara melekat proses pendaftaran pencalonan presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 19-25 Oktober 2023.

“**D**alam konteks ini, yang kami pilih adalah melakukan pengawasan secara melekat khusus selama rentang 19-25 Oktober. Kami mengajak parpol yang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden untuk dapat simultan memberikan informasi kepada Bawaslu,” kata Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, di Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023.

Menurut Lolly, hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya sengketa pada tahapan pendaftaran pencalonan presiden dan wakil presiden di KPU.

“Sehingga nanti berbagai upaya yang memungkinkan, misalnya potensi sengketa, itu tak terjadi,” ujar Lolly.

Dia menyampaikan, parpol juga harus memberikan kepercayaan kepada Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024.

“Dalam konteks ini komunikasi partainya ke Bawaslu kan bagian dari mengawal benar secara prosedur dan tepat waktu,” kata Lolly.

Jelang pendaftaran pencalonan presiden dan wakil presiden, Bawaslu juga akan terus melakukan komunikasi secara intensif dengan penyelenggara Pemilu lainnya seperti KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Komunikasi terus dilakukan oleh Bawaslu ke sesama penyelenggara pemilu,” kata Lolly.

Komunikasi itu dilakukan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Selain itu, komunikasi dilakukan untuk mengetahui sistem yang digunakan oleh KPU dalam setiap tahapan.

“Dalam konteks ini kan kita sama-sama tahu bahwa salah satu terobosan KPU itu selalu menggunakan aplikasi dalam berbagai tahapan,” ucap Lolly.

Dengan begitu, tidak akan terjadi permasalahan kembali mengenai sistem yang digunakan oleh KPU dalam setiap tahapan pemilu.

“Tentu saja harapan kami misalnya problem Sidalih, Silon, problem Sipol kemarin itu tak terjadi saat pencalonan presiden dan wakil presiden,” ujar Lolly.

Menurut Lolly, Silon untuk pencalonan presiden dan wakil presiden tidak serumit pada saat pendaftaran calon partai politik peserta pemilu.

“Karena tidak terlalu banyak, tidak akan sekompleks pencalonan, tidak akan sekompleks verifikasi parpol juga,” ucap Lolly.

Lolly mengatakan, sistem informasi yang digunakan oleh KPU pada pendaftaran pencalonan presiden dan wakil presiden, diharapkan bisa dijangkau lebih luas oleh Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024.

“Sehingga harapan saya aplikasi yang akan digunakan KPU nanti mudah-mudahan jadi lebih luas, yang bisa dibaca oleh Bawaslu-nya,” kata Lolly.

Dia menerangkan, Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi jalannya tahapan Pemilu berwenang untuk mengetahui proses yang dilakukan KPU dengan sistem informasi miliknya. “Kami memang viewers, akses membaca, tapi mudah-mudahan di fitur-fiturnya lebih terbuka,” kata Lolly.

Lolly menyampaikan, keterbukaan KPU juga sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui jalannya seluruh proses tahapan Pemilu 2024. Sehingga, masyarakat dapat informasi calon pemimpin secara komprehensif.

Dia menuturkan, keberadaan Bawaslu sangat penting di setiap tahapan Pemilu Serentak 2024. “Yang perlu garisbawah adalah soal ketepatan, keabsahan dan kebenaran dari seluruh proses yang dilakukan KPU dan Bawaslu penting untuk hadir di situ (setiap tahapan pemilu),” kata Lolly.

Di samping itu, Bawaslu juga sampai saat ini masih menunggu KPU untuk merevisi PKPU 10/2023 dan

PKPU 11/2023. Sebab, putusan Mahkamah Agung (MA) wajib dijalankan.

“Kan begitu putusan MA ini harus dijalankan. Ia (MA) berkekuatan hukum, tidak ada alasan KPU untuk tidak menjalankan,” jelas Lolly.

Jika putusan MA tidak dijalankan, Lolly khawatir akan berdampak pada tahapan yang sedang dijalankan oleh KPU.

“Yang ideal memang ada revisi terhadap PKPU. Tapi kan pilihan ini belum diambil hingga hari ini oleh KPU untuk melakukan revisi. Tapi KPU sudah menindaklanjuti den-

gan membuat surat dinas,” jelas Lolly.

Kendati begitu, banyak pihak termasuk pemantau atau pemerhati pemilu menilai bahwa surat dinas yang dikeluarkan KPU itu bukan bagian dari upaya menindaklanjuti putusan MA. “Ada sebagian orang bilang itu surat hanya imbauan,” kata Lolly.

Lolly menambahkan, Bawaslu dalam hal ini sangat menghormati putusan MA. Hal yang terpenting adalah pihaknya akan melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses yang akan dijalankan oleh KPU.

“Kalau Bawaslu menghormati putusan MA. Maka tentu, Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap proses yang berjalan nanti. Sekarang penyusunan menuju penetapan tentu yang akan jadi putusan MA Bawaslu hormati dan kami akan lakukan pengawasan,” terang Lolly.

Lolly menegaskan, Bawaslu juga akan melakukan pengawasan terhadap surat yang dikeluarkan KPU sebagai pengganti PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023. Pengawasan itu dilakukan agar seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 dapat mematuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagaimana tindak lanjut pada putusan MA.

“Termasuk tentu saja melakukan pengawasan berjalannya surat KPU agar parpol memenuhi dan memedomani putusan MA,” kata Lolly.

Lolly mengatakan, kebijakan pengganti yang dikeluarkan KPU dalam tindak lanjut putusan MA itu juga kan diawasi. “Tidak PKPU, tapi ada surat bagaimana jalannya Bawaslu akan melakukan pengawasan,” tandas Lolly. ●RDO





“Kalau tidak dibenahi, sangat mungkin nanti partai politik peserta pemilu 2024 yang tidak dapat kursi menyengketakan dengan alasan partai seharusnya tidak boleh ikut pemilu karena jumlah caleg perempuannya di bawah 30 persen”

Hadar Nafis Gumay

INFO
KPU

7

Minggu III • Oktober 2023

KPU ABAIKAN PUTUSAN MA HASIL PEMILU RAWAN SENGKETA

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah mengabulkan uji materi terkait PKPU 10/2023 yang mengatur syarat keterwakilan 30 persen perempuan di setiap daerah pemilihan dinilai tidak ditanggapi serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Keputusan itu hanya ditindaklanjuti KPU dengan membuat surat edaran nota dinas kepada partai politik peserta pemilu yang isinya secara garis besar memerintahkan untuk mematuhi putusan MA. Surat nota dinas yang dikeluarkan KPU itu tertulis nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023.

Sementara itu, MA dalam putusan nomor 24 P/HUM/2023 telah memerintahkan KPU dan partai politik menjalani syarat mengenai keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dengan perhitungan pembulatan ke atas. Keputusan itu diketahui berbeda dengan baleid yang tertulis di PKPU 10/2023.

Dalam Pasal 8 ayat 2 PKPU 10/2023 disebutkan penghitungan kuota 30 persen caleg perempuan di setiap dapil menggunakan pendekatan pembulatan ke bawah. Berdasarkan hal itu, kini KPU pun kembali mendapat kritik dari masyarakat dan pemerintah pemilu.

Sebab, KPU seharusnya menjalankan putusan MA dengan merevisi PKPU 10/2023. Permintaan itu disebutkan untuk menguatkan landasan pijakan hukum mengenai syarat kuota 30 persen caleg perempuan pada setiap dapil.

Di sisi lain, jika KPU tak mengubah PKPU 10/2023, maka berpotensi partai politik kehilangan sejumlah dapil lantaran tidak bisa memenuhi keterwakilan caleg perempuan sebanyak 30 persen.

KPU menegaskan tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada setiap partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak bisa memenuhi syarat kuota caleg perempuan di dapil sebesar 30 persen.

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mengklaim, di dalam UU 7/2017 tentang Pemilu tidak ada pasal yang menyebutkan partai politik peserta pemilu akan diberikan sanksi apabila tidak memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan di setiap dapil.

“Kalau di undang-undang tidak ada sanksi, KPU kan tidak bisa memberikan sanksi,” kata Hasyim, Rabu, 11 Oktober 2023.

Hasyim menjelaskan atas tidak adanya ketentuan sanksi dalam UU 7/2017, maka bagi tiap partai politik yang tidak dapat memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan tetap dibolehkan untuk mengikuti kontesasi di setiap dapilnya di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Hasyim berdalih, KPU dapat menaruh sanksi menghilangkan dapil untuk parpol yang tidak dapat memenuhi syarat 30 persen caleg perempuan apabila hal itu telah diatur dalam UU Pemilu.

“Ya tetap memenuhi syarat (MS) karena tidak ada aturan yang harus membatalkan itu menurut Undang-Undang Pemilu. Nah, kalau sampai memberikan sanksi, apalagi pembatalan, harus UU yang mengatur itu,” jelas Hasyim.

Hasyim mengungkapkan, sejatinya tanpa harus merevisi, PKPU 10/2023 secara langsung telah berubah mengikuti baleid yang disampaikan melalui keputusan MA Nomor 24/P/HUM/2023. Hal itu lantaran dalam amar putusan MA secara otomatis telah membatalkan Pasal 8 ayat 2 di PKPU 10/2023 tentang perhitungan kuota 30 persen dari pembulatan ke bawah.

“Amar putusan-nya kan membatalkan Pasal 8 Ayat 2 tentang pembulatan ke bawah. Lalu di poin berikutnya, MA juga sudah merumuskan bahwa

menjadi dibulatkan ke atas. Jadi sudah berubah rumusan itu,” tutur Hasyim.

“Jadi tanpa revisi PKPU itu sudah berubah. Ya seperti UU Pemilu misalkan ketika di JR di MK juga tidak pernah ada perubahan UU-nya. Karena MK merumuskan sendiri perubahannya. Jadi ini sama dengan putusan MA, merumuskan sendiri, maka surat KPU itu mengikuti rumusan untuk menyampaikan kepada partai politik,” sambung Hasyim.

Sementara itu, sejumlah pihak menilai imbas dari ketiadaan sanksi ini bisa membuat semua partai politik abai terhadap putusan MA. Sebab, dalam DCS yang dikeluarkan KPU telah mencatat hampir semua partai politik peserta Pemilu 2024 caleg perempuannya tidak mencapai 30 persen di sejumlah dapil.

Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, mengatakan, berdasarkan data yang diambil dari jumlah keseluruhan DCS bakal caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, hampir semua partai politik tidak memenuhi syarat 30 persen keterwakilan caleg perempuan pada sejumlah dapil.

Jumlah bakal caleg perempuan yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mencapai 30 persen dalam 31 Dapil. PDIP tidak mencapai 30 persen di 25 dapil. Kemudian, dari 18 partai politik, ada 226 dapil yang caleg perempuannya juga tak mencapai 30 persen.

Berkaitan dengan hal itu, menurut Hadar, jika KPU tak segera membenahi atau merevisi PKPU 10/2023, maka ke depannya akan berpotensi menimbulkan banjir sengketa paska penyelenggaraan Pileg 2024.

Sebab, bisa saja parpol yang tidak lolos ke

parlemen mengajukan gugatan akibat sanksi di PKPU tersebut soal menghilangkan dapil jika parpol tak penuhi syarat 30 persen caleg perempuan tidak diterapkan KPU.

“Kalau tidak dibenahi, sangat mungkin nanti partai politik peserta pemilu 2024 yang tidak dapat kursi menyengketakan dengan alasan partai seharusnya tidak boleh ikut pemilu karena jumlah caleg perempuannya di bawah 30 persen,” ungkap Hadar.

“Kacau memang, jadi ketidakmandirian dan ketidakprofesionalan mereka merusak semua ini. KPU harus bertanggungjawab secara etika,” sambung Hadar.

Hadar menjelaskan, dalam Pasal 40 Ayat 3 huruf (c) PKPU 10/2023 juga telah disebutkan bahwa KPU akan mengembalikan data berkas dokumen pendaftaran pada partai politik peserta Pemilu 2024 apabila tidak dapat memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan di dapil tersebut.

Beleid yang diatur dalam PKPU 10/2023 tersebut merupakan bentuk tindak lanjut UU Pemilu yang mengamankan kepada KPU memberi kesempatan perbaikan ke partai politik peserta Pemilu 2024. Namun bukan pada saat DCS atau DCT ditetapkan.

“Jadi memang sesuai UU, KPU harus memberi ruang perbaikan. Sementara yang dimaksud ruang perbaikan ini adalah seperti dalam PKPU Pasal 40 Ayat 3. Jadi bukan ruang perbaikan setelah ditetapkan jadi DCS atau DCT,” terang Hadar.

Hadar menegaskan, sebagai pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pemilu, KPU seharusnya memiliki sikap yang profesional dan berintegritas untuk tertib atas peraturan perundang-undangan.

“Jadi, kalau KPU mau mengatur atau nantinya akan memaksudkan yang lain lagi, ya harus tertib dan pastikan selaras dalam peraturan, seperti perintah undang-undang,” tegas Hadar.

Hadar menuturkan, perubahan atau revisi PKPU 10/2023 sejatinya tidak hanya memberi landasan kuat untuk memaksa parpol memperbaiki, namun juga mencegah terjadinya banjir sengketa paska pelaksanaan Pileg 2024.

Hadar menilai, keputusan surat dinas yang telah dikeluarkan oleh KPU dalam menindaklanjuti putusan MA, sangat mungkin tidak diikuti oleh parpol. Hal itu lantaran tidak ada sanksi yang tegas untuk menindak parpol yang tidak dapat memenuhi persyaratan 30 persen caleg perempuan di setiap dapil.

Hadar menambahkan, keputusan untuk merevisi PKPU 10/2023 dapat menjadi jalan tengah agar mengurangi sengketa parpol paska Pemilu 2024.

“Jadi substansi mendasarnya adalah hak terkait pencalonan perempuan sesuai pengaturan dalam UU Pemilu, paling sedikit 30 persen pada setiap pemilihan setiap dapil itu harus diterapkan,” tandas Hadar. ●RDO



“Raihan kursi sangat menentukan siapa yang akan maju dalam Pilgub dan dengan siapa partai akan berkoalisi, termasuk kemungkinan hadirnya calon independen”



Hendra Yasin

BELUM ADA CAGUB GORONTALO YANG BERTINDAK POLITIK AGRESIF

Lembaga survei Curva Survei Indonesia (CSI) telah melakukan analisis mengenai peta politik yang akan memengaruhi Pilkada Gorontalo pada tahun 2024 mendatang.

Secara khusus, dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024, menurut hasil analisis CSI saat ini situasinya masih relatif tenang. Belum ada calon yang menunjukkan tindakan politik yang agresif.

Meskipun hasil survei awal menunjukkan adanya persaingan yang cukup ketat di antara para calon potensial, tampaknya mereka masih menahan diri dan menunggu hasil dari Pemilu yang akan berlangsung pada Februari 2024 mendatang.

Direktur CSI Gorontalo, Hendra Yasin menjelaskan bahwa kesuksesan dalam Pemilu ini akan memiliki dampak signifikan pada peta politik Pilgub. Partai politik yang mendukung calon-calon tertentu akan mulai aktif bergerak menuju Pilkada Gorontalo 2024 nanti.

Menurut Hendra, saat ini, partai-partai di Gorontalo fokus pada upaya meraih kursi dalam Pemilu 2024.

“Raihan kursi sangat menentukan siapa yang akan maju dalam Pilgub dan dengan siapa partai akan berkoalisi, termasuk kemungkinan hadirnya calon independen,” ungkap Hendra.

Hendra juga menyebutkan bahwa sudah ada beberapa nama yang banyak disebut-sebut sebagai potensial calon dalam Pilkada 2024.

Misalnya, dari Partai Golkar ada Ida Syahida, Roem Kono, Marten Taha, Syarif Mbuinga, Toni Uloli, dan Zainudin Amali. Sementara dari Partai Gerindra ada Elnino Mohi, dan dari Partai Nasdem ada

Rachmat Gobel, Hamim Pou, dan Abdul-lah Gobel.

“Meskipun nama-nama ini cukup populer di kalangan masyarakat, keputusan akhir untuk maju atau tidak dalam Pilkada 2024 akan sangat bergantung pada hasil dari Pemilu 2024 mendatang,” ulasnya.

Sebelumnya juga konstalasi politik menuju 2024 kembali menjadi topik utama dalam acara pelantikan KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini menjadi ajang diskusi tentang tokoh-tokoh potensial dari Gorontalo yang mungkin akan mencalonkan diri dalam Pilgub 2024.

Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo, Arifin Djakani yang juga menjabat sebagai Presidium KAHMI menyebut Nelson Pomalingo dan Marten Taha adalah dua tokoh yang layak dijagokan sebagai calon Gubernur dalam Pilgub tersebut.

“Ya, Nelson dan Marten layak untuk maju dalam Pilgub 2024. Keduanya memiliki pengalaman yang cukup dan mereka cocok untuk posisi tersebut,” ujar Arifin.

Nelson Pomalingo telah dua kali memimpin Kabupaten Gorontalo, yang merupakan salah satu daerah terbesar di provinsi ini. Sementara Marten Taha juga telah dua periode memimpin ibukota provinsi Gorontalo sebelum provinsi ini berdiri sendiri. Pengalaman mereka memimpin daerah ini bisa menjadi tolak ukur untuk mendukung mereka sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur di masa mendatang.

Selain itu, keanggotaan mereka

dalam KAHMI juga memberikan modal tambahan. Dengan bersama-sama di korps ini, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menyatukan visi dan misi mereka dalam membangun Provinsi Gorontalo ke depan.

Arifin juga menilai bahwa selain Nelson dan Marten, beberapa Presidium KAHMI lainnya juga layak dipertimbangkan sebagai calon dalam Pilgub 2024.

Salah satu contohnya adalah Thariq Modanggu, tokoh yang menggagas ‘Motabi Kambungu.’ Menurut Arifin, Thariq juga pantas untuk memimpin Gorut untuk periode kedua.

“Ya, Pak Thariq juga layak untuk memimpin Gorut dalam periode kedua,” kata Arifin.

Selain itu, Arifin juga menyebut nama Hamim Pou sebagai potensi calon di DPRD Sulawesi Utara dan Lahmudin Hambali yang layak untuk kembali bekerja sebagai wakil rakyat di Boalemo.

Bahkan, Dahlan Usman, yang selalu berjuang bersama petani, juga dianggap layak untuk berjuang demi kepentingan masyarakat.

“Intinya, semua Presidium KAHMI ini adalah tokoh-tokoh potensial yang layak menjadi pemimpin bagi rakyat,” tambahnya.

Tentu saja, konstalasi politik ini masih akan mengalami banyak perubahan dan perkembangan dalam beberapa tahun ke depan. Namun, dengan banyaknya tokoh potensial di Provinsi Gorontalo, Pilgub 2024 diharapkan akan menjadi kontes

yang menarik dan berpotensi menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Sementara Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, memberikan tanggapan terhadap isu bahwa Partai Gerindra akan mengusungnya sebagai calon Gubernur dalam Pilgub Gorontalo 2024. Hamim menyatakan penghargaannya terhadap pernyataan Gerindra yang mengindikasikan potensi dirinya sebagai calon.

“Terima kasih kepada teman-teman saya di Gerindra yang menghargai kemungkinan saya maju. Saya sangat menghormatinya. Di Gerindra, juga ada banyak kader-kader yang sangat berkualitas. Sekali lagi, kita bisa berkolaborasi,” ucap Hamim.

Sebelumnya, nama Hamim Pou mencuat setelah juru bicara Gerindra Gorontalo menyatakan bahwa Hamim Pou layak diusung sebagai calon Gubernur Gorontalo. Hamim diakui sebagai seorang bupati yang berhasil mengatasi berbagai masalah di masyarakat Gorontalo, terutama di Kabupaten Bone Bolango.

Hamim Pou diketahui akan maju sebagai Calon Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara. Oleh karena itu, sebagai politikus Nasdem, dia harus mengundurkan diri dari jabatan bupati dan akan secara resmi berhenti setelah namanya terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

“Seiring dengan itu, secara otomatis, saya akan berhenti menjadi Kepala Daerah, tetapi hal ini akan melalui proses Paripurna di DPRD Kabupaten Bone Bolango, dan saya akan tetap berkoordinasi dengan kementerian,” tambahnya. • IRY





“Pak Pras adalah tokoh kunci yang populer di Jakarta dan telah berkontribusi dalam dinamika pembangunan Jakarta selama 10 tahun terakhir”

M Syaiful Jihad

KAHMI USUL 5 TOKOH KUNCI POPULER DI JAKARTA

Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Jakarta Selatan (Jaksel) telah memberikan dukungan dan dorongan kepada Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, dan Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2024.

Bendahara Umum MD KAHMI Jakarta Selatan, Harjono menyatakan bahwa keduanya merupakan pilihan yang sangat tepat untuk menjadi cagub DKI Jakarta tahun 2024 berdasarkan pengalaman mereka yang cukup baik dalam dunia pemerintahan.

Menurutnya, keduanya juga memiliki pengakuan luas di kalangan masyarakat karena keterlibatan mereka di bidang legislatif, satu di tingkat nasional dan yang lainnya di tingkat DKI Jakarta.

“Ahmad Ali dan Prasetio Edi adalah individu yang baik dan memiliki pengaruh yang besar, serta memiliki pengalaman yang kuat di lembaga legislatif,” ujar Harjono.

Meskipun demikian, Harjono mengungkapkan bahwa MD KAHMI Jakarta Selatan belum menerima pernyataan resmi dari KAHMI Jaya yang mendukung lima tokoh Jakarta sebagai kandidat cagub DKI Jakarta.

KAHMI Jaya sebelumnya telah mengusulkan lima tokoh sebagai kandidat cagub DKI Jakarta dalam Pilgub DKI 2024. Salah satunya adalah Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

Ketua KAHMI Jaya, M Syaiful Jihad, menyebutkan bahwa empat tokoh lainnya yang diusulkan adalah Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, Deputy Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Marullah Matali, Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR), KH Lutfi Hakim, dan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Syaiful menjelaskan bahwa Ahmad Ali memiliki kualifikasi yang cocok untuk menjadi Gubernur DKI berdasarkan pengalamannya, status sebagai alumni HMI, keberhasilannya sebagai pengusaha, dan pengalaman politiknya sebagai anggota DPR serta Ketua Fraksi NasDem DPR dan Komisi III DPR.

Sementara itu, Prasetio Edi Marsudi dianggap sebagai tokoh utama dalam perkembangan Jakarta karena pengalamannya sebagai Ketua DPRD DKI selama dua periode, yang membuatnya sangat menguasai penataan dan pembangunan di Jakarta.

“Pak Pras adalah tokoh kunci yang populer di Jakarta dan telah berkontribusi dalam dinamika pembangunan Jakarta selama 10 tahun terakhir,” kata Syaiful.

Marullah Matali dikenal luas di kalangan komunitas Betawi di Jakarta, sementara KH Lutfi Hakim adalah sosok yang dekat dengan masyarakat Betawi dan juga merupakan kader HMI Cabang Ciputat.

Terakhir, Ahmad Riza Patria, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa periode 2017-2022, juga dianggap sebagai tokoh yang memiliki pengalaman dalam perkembangan Jakarta, meskipun masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur hanya beberapa tahun.

“Sekelompok lima tokoh ini dianggap pantas untuk menjadi pemimpin Jakarta dalam Pilgub Jakarta tahun 2024. Mereka memenuhi syarat untuk memimpin Jakarta di masa depan,” demikian disampaikan Syaiful.

Parpol Belum Aktif Bahas Pilgub DKI Jakarta

Sejumlah partai politik belum secara aktif membahas Pilgub DKI Jakarta, meskipun tinggal satu tahun lagi. Meskipun beberapa nama calon potensial telah muncul dalam perbincangan publik mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, beberapa partai yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengakui bahwa mereka belum memprioritaskan perbincangan mengenai Pilgub DKI Jakarta.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih belum mengambil langkah lebih lanjut dalam persiapan untuk menghadapi Pilgub DKI Jakarta 2024.

Gembong Warsono, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P DKI Jakarta, menjelaskan bahwa partai tersebut saat ini sedang berfokus pada perencanaan strategi untuk Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Oh, tentang Pilgub DKI belum. Kami masih berkonsentrasi pada Pileg dan Pilpres. Jadi, belum ada pembahasan yang intens mengenai Pilgub DKI,” ujar Gembong.

Gembong juga menegaskan bahwa hal ini sesuai dengan arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P kepada seluruh pengurus partai, termasuk di DKI Jakarta.

“Setelah Pileg dan Pilpres berlalu, kami akan lebih intens mempersiapkan diri menghadapi Pilgub 2024. Karena memang kami diminta untuk fokus terlebih dahulu pada Pileg dan Pilpres,” kata Gembong.

Sedangkan Partai Gerindra DKI juga belum membahas secara mendalam persiapan atau calon yang akan diusung dalam Pilgub Jakarta 2024. Saat ini, DPD Gerindra juga mengikuti fokus DPP Gerindra yang tengah mempersiapkan strategi untuk Pilpres dan Pileg 2024.

“Semua perhatian saat ini tertuju pada Pilpres dan Pileg 2024,” kata Rahayu Saraswati, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, yang juga merupakan keponakan Prabowo Subianto.

Rahayu Saraswati juga menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada nama-nama yang dipertimbangkan untuk bertarung dalam kontestasi politik di DKI Jakarta.

Menurut analisis politik dari Ipsos Public Affairs, Arif Nurul Imam, situasi ini adalah hal yang wajar. Hal ini disebabkan oleh fokus hampir seluruh partai politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, yang akan berlangsung lebih awal dibandingkan Pilgub 2024.

“Hari ini, kita prioritas Pileg dan Pilpres, baru kemudian Pilgub. Oleh karena itu, partai politik dan elite politik saat ini lebih fokus pada Pemilihan Legislatif dan Pilpres,” kata Arif. •IRY



“Andi Sudirman aktif mensosialisasikan dirinya dalam berbagai kesempatan kunjungan kerja di daerah yang merupakan indikator kuat bahwa ia berpotensi maju dalam Pilgub Sulsel 2024”



Sukri Tamma

TANTANGAN ANDI SUDIRMAN DALAM PILGUB SULSEL

Andi Sudirman Sulaiman (ASS), memiliki potensi untuk kembali maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2024.

Jika memutuskan untuk bertarung kembali, Andi Sudirman memiliki peluang besar untuk terpilih kembali sebagai gubernur karena statusnya sebagai petahana yang populer.

Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Sukri Tamma, nama Andi Sudirman dianggap layak masuk dalam bursa calon gubernur adalah hal yang wajar.

Menurut Sukri, hal ini karena kepala daerah yang menjabat biasanya cenderung maju lagi di periode kedua.

Sukri juga mencatat bahwa meskipun Andi Sudirman belum secara resmi menyatakan niatnya untuk maju, namun tanda-tanda keinginan tersebut sudah mulai terlihat.

“Andi Sudirman aktif mensosialisasikan dirinya dalam berbagai kesempatan kunjungan kerja di daerah yang merupakan indikator kuat bahwa ia berpotensi maju dalam Pilgub Sulsel 2024,” jelasnya.

Sukri juga menyoroti kedekatan Andi Sudirman dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, interaksi ini sebagai upaya untuk memperkuat basis politiknya.

“Kehadiran Prabowo dalam beberapa acara di Sulsel dianggap sebagai bagian dari strategi sosialisasi Andi Sudirman, bahkan dapat membuka peluang kerjasama dengan Partai Gerindra jika ia memutuskan maju dalam Pilgub,” bebernya.

Keunggulan Andi Sudirman sebagai petahana juga menjadi faktor penting dalam Pilgub Sulsel. Statusnya sebagai petahana memberinya keunggulan awal karena popularitasnya yang tinggi dan pengalaman kerjanya sebagai gubernur.

Saat ini, belum ada figur calon gubernur yang dengan tegas memproklamirkan diri, kecuali kader Golkar, Ilham Arief Sirajuddin.

Namun, ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh Andi Sudirman dalam perjalanannya menuju Pilgub Sulsel.

“Salah satunya adalah potensi adanya hambatan fundamental, seperti masalah hukum atau skandal politik yang dapat menghambatnya maju,” jelasnya.

Selain itu, isu adanya kemungkinan kakak kandung Andi Sudirman, Andi Amran Sulaiman, juga akan maju

dalam Pilgub Sulsel bisa menjadi pertimbangan bagi Andi Sudirman.

Sukri Tamma, mengungkapkan bahwa kemunculan nama-nama Cagub Sulsel 2024 tidak terjadi begitu saja. Mereka telah membangun reputasi dan kehadiran di berbagai konteks sehingga dianggap memiliki kapabilitas untuk bersaing.

Nama-nama yang kini mencuat adalah Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum DPP Golkar, yang sebelumnya pernah mencalonkan diri pada Pilgub 2018, namun kalah.

Andi Iwan Darmawan Aras, Ketua Umum DPD Gerindra Sulsel. Rusdi Masse, Mantan Bupati Sidrap selama dua periode dan Ketua Umum DPW NasDem Sulsel. Adnan Purichta Ichsan, Bupati Gowa yang telah menjabat selama dua periode dan memiliki pengalaman sebagai anggota DPRD Sulsel selama dua periode.

Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Mantan Wali Kota Makassar yang pernah bertarung di Pilgub Sulsel 2013 sebagai pasangan Aziz Qahhar Mudzakkar. Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, Nama Wali Kota. Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara dan Ketua DPD II Golkar Luwu Utara. Taufan Pawe: Wali Kota Parepare dan Ketua DPD I Golkar Sulsel.

Andi Fahsar M Padjalangi, Bupati Bone yang juga menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Bone. Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, Eks Pangdam XIV/Hasanuddin yang juga masuk dalam daftar calon yang akan menantang Andi Sudirman

Sulaiman dalam Pilgub Sulsel mendatang.

Kemunculan nama-nama ini menunjukkan bahwa persaingan dalam Pilgub Sulsel 2024 akan menjadi salah satu yang sangat menarik untuk diikuti. Masyarakat Sulsel akan memiliki banyak pilihan dalam menentukan pemimpin mereka di masa mendatang.

Andi Sudirman Sulaiman, telah memberikan tanggapannya terkait wacana kemungkinan akan kembali bertarung dalam kontestasi Pilgub Sulsel 2024. Namun, hingga saat ini, Andi Sudirman belum memutuskan apakah akan maju sebagai petahana atau tidak.

“Kita hanya bisa berdoa kepada Allah SWT. Semoga yang terbaik insyaallah. Mari kita berdoa saja,” katanya.

Berita terbaru mengenai Pilgub Sulsel 2024 telah mencatat kemunculan sejumlah figur calon gubernur yang siap menantang petahana, Andi Sudirman Sulaiman. Seperti yang diberitakan, setidaknya ada 10 tokoh yang mencuat sebagai pesaing dalam kontestasi politik ini.

Sementara Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, memberikan tanggapan mengenai kemungkinan pencalonannya dalam Pilgub Sulsel tahun 2024 setelah ia bergabung dengan PDIP.

“Itu pasti urusan di pimpinan-pimpinan partai. Urusan saya adalah memperjuangkan partai ini, bagaimana berjuang untuk masyarakat. Itu yang saya fokuskan,” ungkap Danny.

Danny menekankan bahwa saat ini fokusnya adalah memenangkan PDIP dalam pemilihan demokratis yang akan datang pada tahun 2024. Dia berkomitmen untuk berjuang dengan sepenuh tenaga untuk tujuan tersebut.

“Kita Pilpres dulu sama Pileg, Pilkada itu belakangan. Kita konsentrasi dulu Pileg sama Pilpres. Bahwa persoalan hasil itu di belakang, perjuangan yang penting,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Sulsel, Andi Ridwan Witiri (ARW), mengungkapkan bahwa Danny telah disiapkan untuk mengisi jabatan penting di Sulsel. ARW tidak menutup ke-

mungkinan bahwa Danny bisa mendapatkan posisi sebagai kepala daerah atau bahkan menteri.

“Jangan hanya bicara Wali Kota dan Gubernur saja, selevel menteri pun dia siap laksanakan. Itu kalau kader partai,” kata ARW. • IRY





“Selama periode tersebut, kami berhasil mencapai banyak penghargaan, termasuk pengakuan sebagai daerah dengan infrastruktur terbaik”

Herman Deru

HERMAN DERU-MAWARDI YAHYA MAJU LAGI DI PILGUB SUMSEL

Mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru telah mengonfirmasi niatnya untuk maju lagi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2024 mendatang.

Herman Deru dengan tegas menyatakan bahwa dia akan kembali bersaing dalam Pilgub Sumsel 2024.

“Bismillahirrahmanirrahim, mohon doa dan dukungannya maju lagi (Pilgub),” kata Herman Deru.

Bahkan Herman Deru juga memastikan akan kembali berpasangan dengan Mawardi Yahya untuk memasuki periode kedua guna mewujudkan visi Sumsel Maju untuk Semua secara berkeadilan.

Dalam beberapa kesempatan Herman Deru menyatakan bahwa selama hampir 5 tahun menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, keduanya telah berupaya maksimal untuk mencapai puncak pencapaian dalam melaksanakan jabatan mereka, dengan satu tujuan bersama, yakni membawa Sumsel Maju untuk Semua.

Sebelumnya, Herman Deru juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sumsel dan disebut-sebut menerima perintah dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, untuk maju sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Dapil Sumsel II.

Meskipun demikian, Herman Deru mengisyaratkan bahwa ia tidak akan bersaing dengan anak dan mantunya dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.

Ia menjelaskan bahwa partainya menginginkan kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai legislatif, tetapi ia tampaknya tidak akan maju dalam Pileg karena anak dan mantunya sudah terdaftar se-

bagai Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Nasdem untuk DPR RI.

“Saya kan sudah ada anak saya dua,” kata HD.

Deru mengklaim dirinya bersama Mawardi Yahya sudah berhasil memimpin Bumi Sriwijaya saat pandemik COVID-19. Selama pandemik itu juga, seluruh stakeholder kompak melangkah sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

“Alhamdulillah, kita tetap berjalan menggapai tujuan yang sudah ditetapkan,” jelas dia.

Ia juga mengapresiasi kenyataan bahwa selama dua tahun pertama masa jabatannya, semua pihak tetap solid dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

“Selama periode tersebut, kami berhasil mencapai banyak penghargaan, termasuk pengakuan sebagai daerah dengan infrastruktur terbaik,” ungkapnya.

Herman Deru juga berharap bahwa silaturahmi yang telah terjalin tidak akan pudar ketika memasuki periode selanjutnya.

Ia mencatat bahwa banyak capaian telah berhasil diraih di Sumsel, bukan hanya dalam hal pembangunan fisik, tetapi juga dalam hal pembangunan non-fisik, termasuk perubahan pola pikir masyarakat agar merasa memiliki daerah Sumsel yang tinggi, yang diakomodasi melalui Perda tentang Kearifan Lokal.

Provinsi Sumsel juga telah menerima sebanyak 206 penghargaan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, keuangan, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, Provinsi Sumsel juga mendapatkan penghargaan di bidang administrasi, umum, dan untuk Tim Penggerak PKK.

Pada tanggal 29 Agustus 2023, Provinsi Sumatera Selatan bahkan masuk dalam tiga besar sebagai Provinsi Terbaik Indonesia dalam ajang “NIRWASITA TANTRA” dalam kategori Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Tahun 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Herman Deru juga menyampaikan pencapaian kinerja berdasarkan tujuan atau Prioritas Pembangunan pada RP-JMD 2019-2023.

Provinsi Sumsel berkomitmen untuk memajukan seluruh wilayah dan mengurangi kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengurangan kemiskinan.

Meskipun pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia, angka pertumbuhan ekonomi Sumsel tetap terjaga di sekitar 5 persen.

Provinsi ini berhasil meningkatkan indikator pembangunan manusia berkualitas, seperti meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 70,02 pada tahun 2019 menjadi 70,90 pada tahun 2022.

Selama kepemimpinan Herman Deru-Mawardi Yahya, IPM Sumatera Selatan telah berubah

dari kategori “Sedang” menjadi “Tinggi” sejak tahun 2019 hingga tahun 2022.

Selain itu, Provinsi Sumsel juga telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini tercermin dalam pencapaian angka Pelayanan Publik yang stabil di kategori BB selama hampir 5 tahun.

Sementara Mawardi Yahya menyatakan bahwa hubungannya dengan Herman Deru berjalan baik dan ia memohon doa untuk yang terbaik.

“Insya Allah, hingga saat ini, saya dan Pak Deru tidak memiliki masalah apapun. Kita bisa berdoa untuk yang terbaik,” ungkap Mawardi.

Ketika ditanya apakah ia berencana maju sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Mawardi belum bisa memberikan jawaban dengan tegas.

“Saat ini, saya belum memiliki rencana konkret mengenai hal tersebut. Jadi, belum ada kepastian,” tandasnya.

Sebelumnya, muncul wacana bahwa Mawardi Yahya bakal mencalonkan diri sebagai Cagub. Hal ini menyusul pernyataan Partai Gerindra di Palembang yang menyatakan niatnya untuk mengajukan Mawardi Yahya sebagai calon gubernur.

Dalam sebuah acara, Partai Gerindra menyatakan akan mendukung kadernya sendiri jika menang di Pileg dan Prabowo Subianto kemenangan di Pilpres.

“Kalau Gerindra menang di 2024, baik di Pilpres maupun Legislatif, maka kami akan mendukung Mawardi Yahya sebagai Gubernur Sumsel,” kata Kartika Sandra Desi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Sumsel, beberapa waktu yang lalu.

Mawardi Yahya tampak mengamini apa yang diungkapkan Kartika. Namun, dia berkomitmen untuk memastikan terlebih dahulu kemenangan Prabowo di Pilpres. •IRY



“Masyarakat perkotaan lebih rasional, mereka melihat para calon dari portofolio dan rekam jejak. Penduduk perkotaan tidak akan salah pilih, mereka paham betul siapa yang dipilihnya”

Bagindo Togar



KURSI LEGISLATIF BUKAN HANYA MILIK ORANG BERDUIT

Banyak orang bermimpi bisa duduk sebagai wakil rakyat dan menjadi anggota legislatif. Untuk mewujudkan hal itu bukanlah mudah karena butuh biaya yang besar. Namun uang saja terkadang tidak, ada faktor lain juga termasuk ridho dari Tuhan dan orangtua.

Di tengah mahalannya ongkos politik, sejumlah Caleg (Calon Anggota Legislatif) dengan modal finansial terbatas masih cukup optimis bisa duduk di kursi DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/ kota. Modal popularitas pun dibutuhkan para Caleg ketika akan maju dalam pemilihan legislatif (Pileg).

Namun, hal itu tak berlaku bagi Jejen Arisandi, Caleg DPRD Kota Palembang dari Partai Demokrat Nomor Urut 3. Meski tidak mudah duduk di kursi dewan dengan persaingan yang bakal ketat, Jejen optimis bisa bertarung memperebutkan kursi yang tersedia.

“Sangat optimis karena pemilihan legislatif merupakan sebuah pertarungan terbuka dan siapapun boleh menerapkan strategi yang menurut mereka paling cocok,” ujar Jejen memulai perbincangannya.

Meski namanya kurang terdengar bahkan dianggap bukan siapa-siapa namun dirinya merasa memiliki kesempatan dan peluang sama dengan yang lain untuk bisa menjadi wakil rakyat.

“Setiap caleg memiliki kesempatan dan peluang yang sama, poinnya adalah menjalani dunia politik dengan gembira, tanpa beban, pesimis dan sinisme terhadap politik,” ungkapnya.

Meskipun hanya anak seorang pedagang buah, dirinya memutuskan tetap maju agar bisa mewakili suara rakyat, khususnya kelompok generasi milenial.

“Pada dasarnya aku ingin berbuat baik, bermanfaat bagi orang lain, untuk rakyat dan untuk masyarakat,” jelas pria 30 tahun ini.

Jejan sendiri dalam kesehariannya berdagang bakso namun berkat usaha keras dia bisa memperluas dagangannya menjadi sebuah gerai.

Sedangkan kehadirannya dalam kontestasi politik ini bisa dibilang membawa suasana segar. Pasalnya, keterlibatan anak muda dalam dunia perpolitikan merupakan sebuah kaderisasi yang sebenarnya untuk Indonesia yang lebih baik.

Dengan menjadi wakil rakyat, khususnya di DPRD Kota Palembang, di-

rinnya berkeinginan memperjuangkan hal-hal yang memang menjadi aspirasi masyarakat.

“Ketika saya menjadi bagian langsung dari masyarakat yang bersuara, saya berharap akan terjadi perubahan yang lebih baik,” ungkapnya.

Dirinya tak memungkiri jika ongkos pencalonan dirinya tidak murah. Namun, baginya hal itu bukan yang utama. Mendapat restu orangtua yang menyertai langkah menuju Pileg 2024 adalah hal yang paling utama.

“Untuk modal, yang utama adalah modal nekat disertai restu dari kedua orangtua yang menyertai langkah menuju Pileg 2024. Tentunya, keperluan biaya logistik kampanye seperti akomodasi, baliho, iklan, memerlukan cost tidak sedikit atau lebih kurang Rp150 juta - Rp250 juta,” bebernya.

Biaya operasional itu berkaca dari pengalaman pencalegan dirinya pada 2019 lalu.

“Tentunya, persiapan men-

2024 sudah kami persiapkan lebih. Sedikit demi sedikit mengumpulkan dana untuk pencalegan tahun ini,” ungkap pengusaha Bakso Rusuk Jawara di Jalan Ariodillah ini.

Selain dari usaha bakso itu, dirinya juga mengepakkan sayap dengan membuka usaha yang bergerak di bidang jasa perizinan.

“Nantinya jika saya terpilih ingin berada di Komisi IV yang membidangi kesejahteraan sosial. Menurutnya, dengan berada di Komisi IV, ia bisa menyampaikan aspirasi yang banyak dikeluhkan masyarakat pada saat ini. Khususnya di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, teknologi, kepemudaan olahraga, agama, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,” ungkap salah satu dosen di Kota Palembang ini.

Direstui Orangtua

Untuk modal pencalegan Jejen Arisandi memang tidak begitu besar. Namun dia mendapat dukungan luar biasa dari orangtuanya, Muzammil dan Roain untuk menjadi Caleg DPRD Kota Palembang Dapil 1 lewat Partai Demokrat meliputi wilayah Bukit kecil, IB 1, IB 2, dan Gandus.

“Bismillah saya merestui Jejen maju sebagai caleg DPRD Kota Palembang Dapil 1 meliputi wilayah Bukit kecil, IB 1, IB 2, dan Gandus lewat Partai Demokrat,” ujarnya Muzammil.

Keinginan maju sebagai wakil rakyat sudah diutarakan jauh-jauh hari. Pada 2019 lalu, dirinya juga memberi dukungan dan restu meskipun belum mendapat kesempatan duduk di DPRD Palembang.

“Insya Allah ikhtiar ini semoga membawa perubahan dan perbaikan yang bermakna untuk semua orang,” katanya.

Dirinya memberi pesan kepada Jejen untuk menjalani apapun pekerjaan dengan niat yang baik. Kemudian berjuang dengan konsisten dan bekerja ikhlas demi kemajuan bersama.

“Saya sebagai ayah hanya berpesan dan sekaligus peringatan untuk mencegah diri dari penyalahgunaan kekuasaan dan memahami prinsip visi dan misi pencalegan yang dibekali pengetahuan yang memadai agar dapat menghargai setiap hal. Apapun itu,” ungkap Muzammil.

Dirinya juga terharu ketika Jejen akan mendaftarkan diri sebagai Bacaleg beberapa waktu lalu.

“Jejan sempat membasuh kaki saya dan Ibunya. Semoga harapan dan cita-citanya menjadi wakil rakyat bisa menjadi kenyataan,” tukasnya.

Bahkan Jejen dari rumah sempat membasuh kaki kedua orangtuanya agar langkah besar menjadi wakil rakyat beriringan dengan doa dan restu orang tua.

Sementara itu pengamat Politik Sumsel Bagindo Togar Butar Butar, uang bukanlah segalanya karena pemilih rasional masih banyak. Mereka akan memilih karena berdasarkan kapasitas bukan karena uang.

Hal yang sama juga di Pilpres 2024, para pemilih akan memilih sesuai hati nurani mereka. Kalau memang dihati, bisa saja caleg itu terpilih.

“Kalau saya cermati untuk Pilpres pemilih rasional lebih besar mencapai 70 persen. Sedangkan di pemilihan legislatif lebih turun hanya 40 persen saja. Kalau pemilihan di Pilkada bisa seimbang 50 persen dan 50 persen untuk pemilih swing voter,” jelasnya.

Togar menjelaskan, segmentasi pemilih memang seperti itu ada beragam mulai dari suara swing voter, suara tradisional dan suara rasional. Untuk suara rasional disebutkannya masih akan banyak di wilayah kota besar seperti di Palembang.

“Masyarakat perkotaan lebih rasional mereka melihat para calon dari portofolio dan rekam jejak. Penduduk perkotaan tidak akan salah pilih mereka paham betul siapa yang dipilihnya,” tuturnya. ●RDR





“Jadi siapapun yang terpilih nanti itulah yang akan kita support karena kita tidak merasa saling bersaing dengan caleg-caleg tersebut”

Yuliana

INFO
CALEG

Minggu III • Oktober 2023

13

BERGERAK SESUAI LATAR BELAKANG DAN PEKERJAAN

Ada banyak cara yang dilakukan para bakal calon legislatif (Bacaleg) untuk melakukan sosialisasi guna menarik simpati. Setiap orang punya cara masing-masing berdasarkan kemampuan dan latar belakang yang miliki.

Hal ini pula yang dilakukan para Bacaleg dalam upaya mendulang suara dan simpati masyarakat di pemilihan legislatif nanti. Di sisi lain mereka juga membantu sosialisasi calon presiden sesuai pilihan masing-masing partai.

Seperti yang dilakukan Sukma Hidayat yang merupakan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari Partai Perindo, Dapil I Sum-sel A yang meliputi wilayah Plaju SU II, Kertapati SU I, Jakabaring, Gandus, IB I, IB II, dan Bukit Kecil.

Sama seperti para Bacaleg lainnya, Sukma juga bergerak dan bersosialisasi kepada masyarakat sesuai latar belakangnya.

“Kalau kita tetap melakukan gerakan-gerakan sosial, membentuk tim pemenangan dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang intinya kita selalu berpegang teguh kepada agama dengan prinsip Man Jadda Wa Jadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh InsyaAllah akan menemukan keberhasilan, dari situ lah awal-awalnya kita untuk berfikir jadi,” tegasnya.

Sebagai aktivis sosial, Sukma tentu melakukan pergerakan dengan cara yang sama pula. Kegiatan yang mereka lakukan itu antara lain melakukan senam bersama di kampung-kampung dengan Senam Sahabat Perindo.

Atas latar belakang aktivis inilah sebenarnya yang membuat Sukma memberanikan diri untuk maju sebagai Bacaleg. Dimana selama ini dari kegiatan-kegiatan sosial seperti pembagian sembako, memperjuangkan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan juga sering dilakukannya.

“Dari situlah masyarakat menyarankan saya untuk menjadi Caleg, harapan mereka semoga dengan duduknya saya di DPRD Provinsi bisa menolong dan memperjuangkan hak masyarakat karena akses untuk memperjuangkan masyarakat semakin luas,” terangnya.

Bahkan dia berangan-angan bila jadi nanti ingin berada di komisi yang menaungi pendidikan dan kesehatan serta kegiatan sosial lainnya.

Terkait soal Pilpres, Partai Perindo yang saat ini berkoalisi dengan PDIP dan mencalonkan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tentunya mendapat tugas

untuk ikut memenangkan kontestasi tersebut.

Bahkan untuk memenangkan Ganjar Pranowo ini, kader Partai Perindo telah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya menggelar jalan santai pada November mendatang.

“Dengan menghadirkan 10 ribu orang dan akan mengundang Ganjar ke Palembang targetnya. Kalau tidak ada halangan akan dilaksanakan pada bulan November ini, dan sekarang lagi menyusun struktur kepanitiaan, dan kita fokus melaksanakan kegiatan tersebut karena sosok Ganjar Pranowo kan sangat senang dengan dunia olahraga terutama jalan santai,” ungkapnya.

Hingga saat ini mereka belum tahu secara pasti siapa yang akan menjadi calon wakil presiden, pendamping Ganjar Pranowo. Hanya saja

ada beberapa opsi yang ditawarkan dan kemungkinan menjadi pilihan yang sesuai bagi para kader pendukung.

“Kalau pandangan pribadi saya sosok yang cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo untuk menjadi wakil Presiden, bagus dari kalangan milenial yang bisa merubah untuk menuju perubahan. Ciri-ciri tersebut ada di sosok Gibran yang merupakan Wali Kota Solo dan merupakan putra Presiden Joko Widodo,” terangnya.

Tidak jauh berbeda dengan Yuliana yang juga Bacaleg dari Partai Perindo Kota Palembang dari Dapil 6 yang meliputi wilayah Jakabaring, Seberang Ulu (SU) I, dan Kecamatan Kertapati.

Dimana untuk memenangkan dan menarik simpati, dia melakukan pendekatan dengan masyarakat terutama dari kaum ibu-ibu, kawula muda dengan mengajak mereka melakukan kegiatan senam, men-

gadakan seminar dan melakukan sosialisasi ke kampung-kampung.

“Menurut saya langkah-langkah tersebut cukup efektif untuk mendongkrak popularitas, karena kalau kita tidak turun ke lapangan secara langsung terkadang walau kita sekampung terkadang masyarakat tidak terlalu kenal dengan sosok kita,” terang Yuliana.

Sesuai arahan Partai Perindo kepada kader khususnya untuk Kota Palembang, mereka harus tetap melakukan konsolidasi baik dengan masyarakat maupun dengan sesama Caleg. Mereka harus tetap solid dan jangan menganggap sesama kader sebagai saingan.

“Jadi siapapun yang terpilih nanti itulah yang akan kita support karena kita tidak merasa saling bersaing dengan caleg-caleg tersebut. Walaupun satu dapil ataupun beda dapil kita tetap saling dukung dan hari tetap konsolidasi sesuai arahan dari pusat,” terangnya.

Selain fokus pada sosialisasi pencalegan, mereka juga diminta untuk fokus mendukung dan menggaungkan sosok Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden RI.

“Memang saat ini belum ada arahan untuk mendukung sosok Ganjar Pranowo menjadi Presiden karena ini belum musim kampanye kan. Untuk kampanye resmi baru bisa dilakukan pada bulan November mendatang karena memang belum ada arahan secara langsung dari pusat,” tegasnya.

Berbeda dengan Sukma, Yuliana lebih menginginkan ketua harian Partai Perindo Tuan Guru Bajang Zainul Majdi (TGB) menjadi wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo.

“Sosok TGB merupakan Hafiz Qur’an jadi saya pikir sosok tersebut untuk ke arah duniawi beliau bisa memfilter. Beliau juga InsyaAllah amanah. Saya melihat sosok TGB bersih waktu menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB),” harapnya.

Sementara terkait pencalonannya sebagai Bacaleg DPRD Kota Palembang, sebagai berkegiatan di bidang pendidikan dan sosial, ia ingin lebih berbuat banyak kepada masyarakat dengan membidik Komisi I yang menaungi pemerintahan.

“Harapan terbesar saya semoga bisa mengkoordinir pemerintahan agar setiap suatu urusan untuk masyarakat itu dipermudah dan tidak dipersulit, fokus saya adalah memberantas kemiskinan dengan menciptakan UMKM untuk kaum ibu-ibu,” jelasnya.

Dia juga melihat pemberdayaan terhadap kaum wanita di Kota Palembang masih sangat kurang. Ada banyak program UMKM yang bisa ditawarkan kepada mereka agar tidak menganggur di rumah dan dapat menambah penghasilan.

“Dengan kita kasih modal, arahan dan kasih pelatihan InsyaAllah angka kemiskinan akan berkurang walaupun tidak diberantas habis tapi paling tidak berkurang dan tingkat perceraian karena faktor ekonomi semakin menurun serta penderita gizi buruk tidak ada lagi,” tuturnya. ●RDR



"Gibran itu adalah anak muda yang memiliki wawasan sangat luas dan menjadi role model politik generasi sekarang"

Muhammad Ridho



KADER GERINDRA INGINKAN GIBRAN JADI PENDAMPING PRABOWO

Mendekati pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ini, para kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mulai bergerak maju. Dari hasil pergerakan itu, para kader Gerindra dari seluruh Indonesia bersepakat untuk mencalonkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto.

Ada beberapa alasan kuat mengapa memilih Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto meski mereka tahu kalau Walikota Solo itu adalah kader dari PDIP serta putra dari Presiden Joko Widodo.

Tanpa mengesampingkan nama-nama yang lain, para kader Partai Gerindra memberikan usulan dan bersepakat mengusung Gibran sebagai Cawapres. Namun bila elemen Koalisi Indonesia Maju (KIM) punya pilihan lain, mereka juga tetap patuh pada keputusan itu.

"Dari seluruh akar rumput Partai Gerindra seluruh Indonesia mengusulkan saudara Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden karena kita menilai saudara Gibran selama memimpin Kota Solo berhasil dan juga mempunyai adab yang baik serta mengayomi yang tua dan muda," ungkap Bendahara Partai Gerindra Sumsel, Prima Salam.

Prima mengungkapkan, sosok Gibran Rakabuming adalah sosok tepat mewakili kaum muda dan 50 persen kaum milenial Indonesia yang akan memiliki hak pilih di Pilpres dan Pileg 2024.

Anggota DPRD Sumsel ini juga mengungkapkan, usulan dari kader

Partai Gerindra ini juga kemungkinan disetujui oleh elemen Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bentuk representatif kaum muda dan tua atau junior senior. Keduanya juga mewakili semua kalangan.

"Kita masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi pada hari Senin ini tentang usia calon kepala negara diambang usia 35 tahun," terangnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palembang ini juga mengungkapkan, mereka optimis ambang batas ini disetujui dan bagi kader, tidak ada nama lain selain Gibran Rakabuming.

"Ada nama-nama lain tapi kita fokus menunggu hasil keputusan MK. Kita dari akar rumput Partai Gerindra hanya menginginkan saudara Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi bapak Prabowo Subianto," ucapnya.

Terkait status Gibran Rakabuming yang merupakan kader dari PDIP, mereka tidak mempermasalahkannya itu. Sementara untuk komunikasi politik mereka juga menyerah-

kan sepenuhnya kepada para elit politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Prima Salam mengungkapkan komunikasi dan lobi-lobi politik hingga saat ini masih terus dilakukan para elit partai di KIM. Terkait apapun hasilnya, mereka tetap menerima dengan sepenuh hati.

"Untuk itu kami sebagai kader di daerah menerima hasil rapat keputusan Koalisi Indonesia Maju karena Partai Gerindra tidak maju sendiri. Sehingga apapun hasilnya nanti kami akan tetap satu komando," tegas Prima Salam.

Sementara untuk Sumatera Selatan sendiri pergerakannya cukup masih mulai dari menyiapkan berbagai hasil di Pemilu, konsolidasi partai, penguatan saksi, penguatan akar rumput serta mengakomodir suara-suara tambahan dari para Caleg dan lainnya.

Hal ini bisa dilihat dari pengukuhan Pengurus Anak Cabang (PAC) DPC Partai Gerindra Kota Palembang yang dihadiri 5000 kader dan simpatisan partai.

"Itu baru sekitar 10 persennya saja dari seluruh Partai Gerindra di Sumsel," ungkap Caleg DPRD Sumsel dari Dapil 1 Kota Palembang tersebut.

Diakui Prima Salam, meski mereka menginginkan Gibran Rakabuming namun suara-suara dukungan dari elemen lainnya juga tetap dirangkul seperti dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan semuanya termasuk dengan ulama di 212.

"Pak Prabowo itu dekat dengan semua ulama. Bahkan saat menjadi tentara pun, beliau cukup dekat dengan kalangan ulama. Mulai dari Habib Rizieq, Habib Luthfi, pokoknya semua dekatlah dan terus menjalin komunikasi," tegasnya.

Sebetulnya kedekatan ulama 212 dengan Prabowo Subianto tidak perlu dipermasalahkan

karena hanya politisasi saja terutama saat Pilkada 2019 lalu saja.

Di Sumatera Selatan sendiri lanjut Prima, para kader Partai Gerindra sudah bergerak masif mulai dari penempatan saksi hingga pembentukan para relawan juga sudah melakukan kegiatannya masing-masing.

Ada banyak relawan Prabowo Subianto yang terbentuk dan semuanya sudah bergerak. Sementara di Partai Gerindra, mereka telah menempatkan saksi di semua tempat pemungutan suara (TPS) untuk menjaga suara Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti.

"Pokoknya untuk saksi-saksi sudah full. Kita juga sudah melakukan pelatihan para saksi dan sudah melakukan pengukuhan para saksi," terang Prima Salam.

Dukungan sama juga disampaikan Muhammad Ridho, Ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) yang merupakan elemen sayap Partai Gerindra. Sebagai kader muda mereka mendukung penuh Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.

"Gibran itu adalah anak muda yang memiliki wawasan sangat luas dan menjadi role model politik generasi sekarang. Memang ada beberapa calon lain seperti Khofifa Indar Parawansa yang berhasil membangun Jawa Timur atau juga ada Erick Thohir. Namun bagi kami pribadi lebih memilih Gibran Rakabuming," tegas caleg termuda Partai Gerindra di Sumatera Selatan ini.

Pemuda berusia 23 tahun ini mengungkapkan, sosok Gibran Rakabuming mampu mengilhami para anak muda untuk berpolitik. Selain itu kepemimpinannya di Kota Solo juga sudah terbukti.

Sehingga perpaduan antara anak muda seperti Gibran Rakabuming dengan tokoh senior pada Prabowo Subianto merupakan penggabungan yang pas dan saling melengkapi.

Gibran mewakili anak muda mampu menginspirasi generasi Indonesia sekarang untuk sadar berpolitik sekaligus membuktikan kalau politik itu hal yang menyenangkan.

Sebagai kader muda lanjut Ridho mereka punya energi berlimpah untuk mendukung pencapresan Prabowo Subianto khusus di Kota Palembang.

Mulai dari melakukan berbagai kegiatan hingga melakukan edukasi politik.

"Kami dari Tidar yang merupakan generasi muda Partai Gerindra siap menangkan Prabowo Subianto di Kota Palembang," tegas Caleg DPRD Kota Palembang dari Dapil 6 ini.

•RDR





“Kita akan berfokus pada pemilihan pemula karena mereka sekarang sudah canggih, sudah tahu dengan media sosial dan sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan buruk”

Syefri Yudha Putra

INFO
DAPIL

Minggu III • Oktober 2023

15

BESAR KECIL KOALISI TIDAK BERPENGARUH BAGI KADER DAERAH

Banyaknya partai berkoalisi untuk mendukung bakal calon Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu di 2024 mendatang, menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) memiliki kekuatan besar. Namun hal itu hanya berlaku di Pilpres sementara bagi kader di daerah, besar atau kecilnya koalisi tidak menjamin kemenangan partai terutama di pemilihan legislatif.

Bagi kader partai di daerah koalisi lebih bertujuan memenangkan satu tujuan yakni Pilpres. Namun tanpa didukung kader yang kuat belum tentu partai pemenang di Pilpres akan menguasai parlemen di pemilihan legislatif nanti.

Sehingga besarnya dukungan partai seperti di Koalisi Indonesia Maju (KIM) bukan menjadi jaminan bagi partai pendukungnya untuk menguasai parlemen juga.

Seperti dikatakan Kader PDIP, Anton Nurdin, gemuknya partai koalisi belum tentu pemilihnya juga besar di Pileg. Demikian juga di Pilpres, belum tentu koalisi besar akan memenangkan pertarungan.

“Jadi tentunya kami masih tetap percaya masyarakat Indonesia lebih bisa melihat, yang mana nantinya akan menjadi seorang Presiden di 2024 mendatang,” terang Caleg PDIP Kota Palembang dari Dapil 1 yang meliputi wilayah yaitu Kecamatan Ilir Barat (IB) I, Ilir Barat (IB) II, Bukit Kecil dan Kecamatan Gandus ini.

Dia meyakini sosok calon presiden yang akan dipilih masyarakat pada pemilu mendatang dan pastinya tanpa ada faktor dari partai-partai.

“Sehingga bagi kami sama sekali tidak ada kegentrangan terkait gemuknya koalisi Prabowo karena yakin para kader PDIP sudah kompak dan menyatakan diri untuk memenangkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden pada periode berikutnya. Mereka bukan memilih partainya tapi orangnya,” terang pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua KONI Kota Palembang ini.

Dia melihat masyarakat Indonesia sekarang sudah lebih pintar dan cerdas, karena sejarah dan jejak digital telah menjadi suatu pertimbangan bagi pemilih-pemilih ke depan nantinya. Sehingga para pemilih lebih tahu mana yang memang untuk kepentingan untuk rakyat dan negara ini.

Sementara sebagai Caleg DPRD Kota Palembang mereka juga mendapat amanah yang besar untuk memenangkan partai di setiap Dapil I. Sehingga selain secara

pribadi mereka harus berkompetisi di pencalegan juga berfikir bagaimana memenangkan secara mutlak untuk partai PDIP di setiap dapil.

“Kami akan bergerak secara sistematis baik dari kader partai langsung maupun non kader bekerja semaksimal mungkin. Namun menurut saya yang paling maksimal adalah kita harus turun langsung ke lapangan face to face karena masyarakat saat ini tidak mau lagi beli kucing dalam karung. Mereka ingin bertemu langsung dan lebih mengenal dengan calon nya secara langsung,” ucap Anton.

Selain itu berbagai pendukung sosialisasi seperti banner, spanduk tetap diperlukan. Namun yang paling penting bagaimana seorang Caleg atau kader itu mampu menyentuh hati rakyat. Bila tersentuh maka dia akan memilih yang bersangkutan tanpa melihat dari partai mana dia berasal.

Hal yang sama diucapkan Rudi Yanto yang merupakan Ketua DPD PKB Kabupaten Banyuasin yang tidak terlalu pusing dengan besar kecilnya partai koalisi di Pilpres 2024 ini. Dimana seseorang yang dipilih itu bukan karena partainya melainkan sosoknya.

Sehingga meski koalisinya besar seperti di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung Prabowo Subianto, itu bukan menjadi jaminan akan menang.

Sebagai kader PKB yang mendukung pencapresan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mereka tentu telah dibekali pemahaman yang cukup besar dari Ketua Umum PKB langsung.

“Untuk itu kami diminta bekerja cepat, dan berlipat-lipat. Kami juga diminta fokus untuk memaksimalkan sasaran suara dari kader PKB. Mulai dari suara Nahdliyin hingga suara-suara dari kantung yang kami miliki,” ucapnya.

Di Pilpres 2024 ini sendiri lanjut Rudi semua kader PKB diminta maksimal seperti yang diinstruksikan Ketua

Umum PKB Muhaimin Iskandar. Mulai dari pemasangan spanduk, baliho serta alat peraga diinstruksikan untuk menggandeng gambar Capres dan Cawapres.

“Untuk di wilayah Kabupaten Banyuasin meskipun wilayahnya ada dua yaitu wilayah perairan dan daratan kami masih sangat optimis karena memang posisi PKB sendiri dan posisi caleg-calegnya sangat berpotensi. Efek masuknya Cak Imin di kertas suara dapat memberikan dampak positif bagi kami sesuai dengan koalisinya yaitu Koalisi Perubahan,” tegas Rudi.

Meski Koalisi Indonesia Perubahan (KIP) tidak sebesar KIM namun kader PKB merasa lebih unggul secara umum. Hal ini bisa dari solidaritas antar kader pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Ada tiga hal yang membuat mereka bersyukur yakni kuatnya solidaritas jaringan mulai dari jaringan organisasi, jaringan kader dan jaringan caleg.

Kemudian kuatnya solidaritas kultural dimana ada kyai-kyai, ulama, pimpinan adat dan tokoh-tokoh masyarakat ikut bergerak.

“Selanjutnya bagaimana kaum muda menjadi potensi pemilih di Pemilu ini. Para kader muda juga bisa bergerak secara mandiri, swadaya untuk menjadi bagian-bagian relawan pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin,” terangnya.

Sehingga langkah yang mereka ambil untuk Pilpres 2024 ini adalah penguatan struktur, penguatan kultur kemudian menggerakkan kaum muda. Mereka yakni po-

tensi menang di Sumsel adalah minimal 60 persen.

Masukan untuk para caleg PKB Sumsel, harus mendekatkan diri ke rakyat, rebut hati dan cinta rakyat, berikan kesempatan untuk mengapresiasi, mengartikulasi, menyampaikan harapan-harapan yang akan kita wujudkan.

“Melihat Koalisi Indonesia Maju, kita lihat saja yang penting kita siap. Siapapun yang akan bertanding kita akan siap,” tuturnya.

Sedangkan Syefri Yudha Putra salah satu Caleg Dapil II Kota Palembang yang meliputi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kemuning, Kecamatan Sukarami dan Kecamatan Alang-Alang Lebar dari Partai Bulan Bintang (PBB) mengatakan, mereka sangat yakin untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dan meraih kemenangan di Pilpres 2024.

“Bahkan keyakinan kami bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju mencapai 100 persen, karena setiap kali Ketua Umum (Ketum) Partai PBB Yusril Ihza Mahendra berkeyakinan berkoalisi dengan salah satu calon Presiden pasti akan terpilih dan menjadi presiden. Insting Ketua Umum PBB selalu tepat, sosok siapa yang akan jadi presiden di masa mendatang,” tegasnya.

Yudha juga menjelaskan, banyak keuntungan PBB berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju, semenjak berkoalisi tersebut mereka lebih dikenal, dan peminatnya sudah lumayan banyak. Sementara untuk Dapil 2 ini mereka menargetkan dua kursi.

“Kita akan berfokus pada pemilihan pemula karena mereka sekarang sudah canggih, sudah tahu dengan media sosial dan sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan buruk. Mudah-mudahan dengan banyaknya caleg muda dan dari kalangan milenial semoga PBB ini bisa dipilih juga oleh kaum milenial tersebut,” terangnya.

●RDR



“Yang tidak bisa kita pungkiri bahwa Partai Golkar secara ideologis dan nasionalis adalah partai tengah, dengan struktur partai sudah mengakar. Hal ini tentu menjadi keuntungan terbesar bagi para kadernya”

Fatkurohman



KADER GOLKAR DAERAH TETAP SOLID MESKI DIBERI PILIHAN SULIT

Meski menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia namun di Pemilu 2024 maupun sebelumnya, Partai Golongan Karya (Golkar) bukan menjadi pemain utama. Meski demikian partai ini terbilang cukup solid hingga ke kader-kader terkecilnya.

Di Pilpres 2024 ini akan menjadi ajang penting untuk menentukan arah politik Indonesia selama beberapa tahun ke depan, dan dukungan dari berbagai partai termasuk di Golkar tentu akan memiliki dampak besar pada hasil akhirnya.

Golkar sendiri sebetulnya telah mencalonkan ketua umum mereka, Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Namun dalam perjalanannya dukungan itu kemudian berubah ke Prabowo Subianto.

Perubahan politik ini cukup berjalan mulus karena tidak ada pertentangan di internal partai karena semua kader sepakat dan tegak lurus sesuai perintah Ketua Umum, Airlangga Hartarto. Sehingga walau mereka bukan menjadi pemain utama namun keutuhan partai tetap terjaga dengan baik.

Soliditas partai ini bisa dilihat dari sikap para kader yang menyatakan tegak lurus terhadap perintah partai. Meski ada beberapa kader partai yang berlainan sikap namun hal itu tidak menjadi masalah terhadap keutuhan partai sendiri.

Seperti diakui Yustin Kurniawan Zendrato, kader Partai Golkar Kota Palembang, apapun keputusan pimpinan, mereka sebagai kader patuh dan tegak lurus mengikuti arahan pusat.

“Beberapa waktu lalu DPP sudah memberikan instruksi untuk kader Partai Golkar di Kota Palembang dalam setiap atribut khususnya Caleg memasang foto Prabowo Subianto,” ungkapnya.

Meski belum mendapatkan instruksi langsung lanjut Yustin namun mereka semua sebagai kader Partai Golkar di daerah sudah menerima arahan. Hanya saja saat ini belum masuk masa kampanye.

Dijelaskan Yustin, meski tidak mendukung Airlangga Hartarto sebagai Capres, suara Partai Golkar secara nasional berada pada nomor dua besar dan menjadi kelebihan yang sudah mengakar hingga ke bawa dan melindungi seperti pohon beringin.

“Meski ada kekecewaan karena gagal menjadikan Ketum

sebagai Capres namun kita tetap berupaya menaikkan elektabilitas yang terpenting adalah tetap fokus pada perolehan suara untuk Partai Golkar,” tegas Caleg Partai Golkar dari Dapil 1 Kota Palembang ini.

Yustin Kurniawan yang menjadi Caleg untuk DPRD Kota Palembang dengan wilayah pemilihan Kecamatan Iir Barat (IB) 1, IB 2, Bukit Kecil dan Kecamatan Gandus tersebut akan mencoba maksimal untuk mendongkrak suara Partai Golkar di Dapilnya.

Sehingga meski mereka bukan menjadi pemain utama di Pilpres namun di Pemilu 2024 ini Partai Golkar harus menjadi pemenang. Walaupun cukup berat namun bukan hal yang mustahil bagi mereka bila melihat tingkat soliditas dan solidaritas para kader di daerah.

Di Pemilu 2019 lalu, Partai Golkar menjadi pemenang kedua sehingga target menjadi pemenang bukan hal yang mustahil bagi mereka.

Penegasan yang sama disampaikan Caleg Partai Golkar Dapil 4 Kota Palembang, Dipo Simpati Alam dengan menyatakan bahwa untuk Pilpres kader Partai Golkar di Palembang sejak awal sudah mendapat instruksi mengukung Prabowo Subianto sebagai Capres di Pilpres 2024.

Sebagai partai besar, lanjut dia tentu mereka berharap agar Airlangga Hartarto bisa diusung menjadi Cawapres.

“Palembang dan Sumsel umumnya yakin untuk Partai Golkar semua kader

solid, meski di pelosok tetap ikut instruksi apapun bentuknya dari pusat dan akan dimaksimalkan untuk kemenangan Prabowo,” jelasnya.

Dipo kembali menegaskan, semua kader Partai Golkar sudah komitmen, apapun keputusan pusat tetap menjalankan mandat, entah itu mendampingi atau tidak mendampingi, mendukung ataupun seperlunya.

“Koalisi Partai Golkar dengan Prabowo Subianto ini terbentuk karena secara visi dan misi kami tidak terlalu jauh,” tambah pria yang biasa disapa DSA ini.

Di tingkat kader sendiri, Dipo memastikan mereka tetap solid untuk membesarkan Partai Golkar. Sehingga walaupun mungkin ada perbedaan di Pilpres atau lainnya namun sebagai kader mereka tetap sepakat untuk sama-sama membesarkan partai.

Baik Yustin maupun DSA sendiri saat ini mereka fokus dengan pencalegan di wilayah masing-masing. Dimana tugas utama mereka sebagai kader Partai Golkar yakni meraih kursi sebanyak mungkin di DPRD Kota Palembang.

“Untuk Pileg 2024 ini kami menargetkan dua kursi dari Dapil 1 Kota Palembang. Di 2019 lalu kami hanya dapat satu kursi dan

InsyaAllah target tersebut bisa kami capai,” terang Yustin

Kurniawan Zendrato.

Terkait soliditas dan karakter Partai Golkar ini, Koordinator Wilayah Sumsel Public Institute (Putin) Fatkurohman mengungkapkan, salah satu kelebihan yang sudah dimiliki Partai Golkar ini adalah mereka memiliki struktur organisasi yang mengakar kuat hingga tingkat yang paling bawa.

“Partai Golkar ini juga dikenal dinamis dan moderat dibandingkan dengan partai-partai lain di Indonesia. Berbeda pandangan antar kader merupakan hal yang biasa namun mereka tetap satu dalam partai,” ungkap Fatkurohman.

Tantangannya adalah figur sentral dari Partai Golkar sendiri dalam beberapa waktu terakhir kurang menonjol untuk level nasional terutama dalam pencalonan presiden 2024. Sosok Airlangga Hartarto dianggap kurang menjual dan pilihan terbaik mereka adalah menjadi partai pengu-sung.

Di sisi lain mereka juga punya kader-kader hebat seperti ada Jusuf Kalla yang pernah menjadi Wakil Presiden bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Bahkan dalam sejarah secara politik, Partai Golkar adalah partai yang dimanapun memiliki peran. Mereka terkadang terlihat ada perdebatan antara kader namun tetap satu dalam organisasi kepartaian.

Diungkapkan Fatkurohman, secara ideologis Partai Golkar memang berkarakter nasionalis dan cenderung bersikap sebagai partai tengah. Hal ini membuat partai berlambang pohon beringin tersebut bisa diterima dimana-mana dan sulit bagi mereka untuk bersikap sebagai oposisi.

“Yang tidak bisa kita pungkiri bahwa Partai Golkar secara ideologis dan nasionalis adalah partai tengah, dengan struktur partai sudah mengakar. Hal ini tentu menjadi keuntungan terbesar bagi para kadernya,” ucap FK.●RDR





“Sebagai Ketua KPU saya berharap para Pj punya tugas utama mensukseskan Pemilu 2024. Jadi Pj jangan mundur, lakukan tugasnya dengan baik sampai habis masa jabatan”

Amrah Muslim

MENAKAR KEKUATAN POLITIK PENJABAT KEPALA DAERAH

Menjelang Pemilu 2024 peran penjabat kepala daerah sangat penting untuk menentukan arah demokrasi daerah selanjutnya. Bukan hal mustahil para penjabat ini memanfaatkan situasi yang ada untuk kepentingan meraih kekuasaan sebagai kepala daerah definitif.

Para penjabat juga berpeluang membentuk oligarki kekuasaan dan mengancam kekuatan incumbent kepala daerah. Sehingga ada kemungkinan baik penjabat maupun incumbent sama-sama berada kekuatan politik.

Bahkan para Pj ini bisa saja menggunakan kekuasaannya untuk menjalankan politik pencitraan sebagai kepala daerah yang baik di mata rakyat dan mengancam para incumbent yang telah habis masa kekuasaannya.

Pengamat politik dan hukum Sumatera Selatan (Sumsel), M Husni Thamrin menjelaskan, semua itu sangat bisa dilakukan oleh para Pj kalau mereka memang ingin mencalonkan diri.

Dengan kekuatannya bisa lebih dekat dengan rakyat, apalagi tidak menggunakan dana pribadi membuat Pj sangat bisa tergiur untuk melakukan praktek oligarki politik di Pemilu 2024 ini.

“Pj bisa saja melakukan blusukan untuk mencalonkan diri kembali di Pemilu. Mereka menggunakan dana bansos untuk menarik perhatian rakyat dengan memberikan beragam bantuan biar terlihat peduli dan memikirkan kepentingan rakyat. Terus pengangkatan honorer dan perbaikan-perbaikan jalan dan sebagainya umum terjadi saat jelang Pemilu,” kata dia.

Menurutnya kampanye berkedok blusukan sebagai penjabat menggunakan semua fasilitas negara dan kekuasaan sebagai kepala daerah lebih mudah. Bahkan para Pj juga bisa dengan mudah memasang semua foto dirinya dan beragam banner.

“Dari sana figur Pj sebagai kepala daerah dibentuk agar rakyat melihat layak untuk dipilih lagi,” jelasnya.

Thamrin meminta rakyat atau masyarakat lebih cerdas menyikapi iklim politik di Indonesia. Bagaimana pola politik dan bagaimana pola benar-benar saat Pj menjalankan aktivitasnya seba-

gai kepala daerah itu adalah tugas bukan figur dirinya secara pribadi.

“Masyarakat harus cerdas karena pencitraan dan tugas itu harus bisa dipahami. Karena bisa saja ada perbaikan jalan disebutkannya karena bapak itu bukan karena memang perbaikan jalan pelayanan pemerintah kepada rakyatnya,” tuturnya dalam sebuah diskusi politik.

Dilanjutkannya, seharusnya semua itu tidak terjadi karena legalitas mereka sebagai apart sipil negara (ASN) dilarang menerapkan ranah politik tersebut. ASN harus menjaga netralitas dan imparialitas dan kode etik serta kode perilaku.

“Semua itu sudah diatur dalam Undang Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Tetapi itu secara legal formalnya dalam praktek bisa saja dimanfaatkan oleh kekuatan lain memanfaatkan Penjabat ini untuk meminta kekuatan birokrasinya kedepan,” jelasnya.

Diakuinya Pj selaku ASN jelas seharusnya tidak boleh mencalonkan diri telah diatur dalam UU No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No 1 tahun 2015 dan UU No 1 tahun 2014 mengatur pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Dalam undang undang itu menjelaskan larangan Pj untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan mencegah Pj itu untuk mundur. Tapi itu hanya normal yang tidak bersifat imperatif atau fakultatif, artinya boleh iya boleh tidak,” tuturnya.

Dilanjutkannya aturan lain dari Kemendagri No 9 membuka kesempatan itu Pj boleh mengundurkan diri.

Artinya Kemendagri membuka peluang

atau memperbolehkan Pj untuk mundur dan mencalonkan diri. Sehingga terkesan ada tumpang tindih aturan.

“Tapi sekarang belum kelihatan bisa kita lihat beberapa bulan kedepan. Semoga saja Pj di Sumsel tidak melakukan itu, memanfaatkan posisinya sebagai incumbent memiliki pengaruh dan kekuasaan bisa mobilisasi pemilih,” pungkasnya.

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan Amrah Muslim menegaskan, secara aturan sebetulnya seorang penjabat kepala daerah itu tidak boleh mundur dan mencalonkan diri.

“Secara prinsip jelas Pj tidak boleh mencalonkan diri. Pada saat menjabat tidak boleh mundur namun pakar hukum menyebutkan masih abu-baru karena ada ruang penjanbat itu bisa mundur dan mencalonkan diri lagi,” tuturnya.

Dia sangat berharap untuk para penjabat kepala daerah di Sumatera Selatan tidak melakukan semua itu karena iklim Pemilu 2024 akan sangat terganggu. Dimana mereka juga membutuhkan bantuan pemerintah saat pelaksanaan Pemilu 2024.

“Sebagai Ketua KPU saya berharap para Pj punya tugas utama mensukses-

kan Pemilu 2024. Jadi Pj jangan mundur, lakukan tugasnya dengan baik sampai habis masa jabatan,” tuturnya.

Sementara akademisi dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Febrian mengatakan, Pj mundur mencalonkan diri boleh saja. Keputusan itu sah kalau sudah ada aturan jelasnya dari KPU. Namun sekarang kejelasannya masih bersifat abu-abu.

Artinya ada aturan yang melarang penjabat kepala daerah untuk mundur dan kemudian ikut di pemilihan kepala daerah. Namun ada juga aturan yang membolehkan meski hal itu masih bersifat abu-abu.

“Sekarang masih abu-abu kita tunggu kedepan keputusan terbaru soal Pj dari KPU pusat. Tetapi untuk sementara Pj di Sumsel yang dilantik buktinya belum ada yang mundur untuk mencalonkan diri. Kita lihat saja nanti kedepannya aturan jelasnya seperti apa,” kata Dekan Fakultas Hukum Unsri ini.

Di sisi lain potensi penjabat kepala daerah untuk ikut kontestasi politik di pemilihan kepala daerah sangat besar. Selama menjabat mereka punya kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan pencitraan yang baik agar dapat kesempatan untuk dipilih di Pilkada.

Hal ini pernah dilakukan para penjabat kepala daerah di Sumsel sebelumnya. Bahkan diantaranya mereka itu ada yang berhasil menjadi bupati. ●RDR





HARAPAN DUNIA USAHA PILPRES SATU PUTARAN

Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengungkapkan aspirasi dari kalangan dunia usaha yang berharap Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasang capres dan cawapres.

Dengan hanya dua capres dan satu putaran, maka Pemilu 2024 bisa berjalan efektif dan efisien. Hal itu juga tidak membuat masyarakat terpecah belah.

Selain itu, juga untuk memastikan momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional tidak hilang karena kondusifitas bangsa terganggu akibat polarisasi Pilpres yang berjalan panjang dan berlarut-larut.

“Lebih dari itu, dunia usaha juga berharap jika capresnya tidak berasal dari dunia usaha seperti Presiden Joko Widodo, cawapresnya diharapkan berasal dari dunia usaha. Sebab, selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, pemerintahan Presiden Jokowi bisa berjalan efektif dan efisien. Tidak lain karena latar belakang beliau sebagai pengusaha,” kata Bamsoet saat memberikan sambutan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia dengan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas Mayjen TNI Agus Arif Fadila di Gedung Lemhannas, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2023.

“Karena itu, ada baiknya jika dalam Pilpres 2024 ini, pasangan capres-cawapresnya juga diikuti perwakilan dari kalangan dunia usaha. Sehingga pemulihan dan pertumbuhan perekonomian yang saat ini sudah berjalan dengan baik, bisa terus terpelihara. Sekaligus memastikan Indonesia Emas 2045 bisa terwujud,” sambungnya.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukam) KADIN Indonesia ini menjelaskan, patut disyukuri bahwa pada beberapa aspek, kondisi perekonomian nasional menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I/2023 tumbuh sebesar 5,03 persen. Angka itu tidak saja melebihi ekspektasi dari banyak pihak, namun juga terjadi di tengah kelesuan ekonomi global. Bahkan, beberapa negara maju mencatatkan pertumbuhan ekonomi di bawah 2 persen, seperti Amerika Serikat dengan

akselerasi pertumbuhan 1,6 persen, Jepang 1,3 persen, dan Singapura 0,4 persen.

“Tingkat inflasi juga terus melandai. Tercatat sebesar 3,08 persen pada Juli 2023, turun dari 5,28 persen pada awal tahun. Angin segar bagi dunia usaha juga ditandai realisasi investasi pada triwulan I/2023 yang mencapai Rp328,9 triliun, dan telah menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 384 ribu tenaga kerja Indonesia. Sehingga berdampak pada penurunan angka pengangguran yang mencapai 7,99 juta orang pada Februari 2023,” jelas mantan Ketua Komisi III DPR bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, bagi dunia usaha, tidak ada yang lebih penting selain kepastian berusaha dan kepastian hukum. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dua hal ini telah berjalan baik. Kedepannya harus tetap dijaga agar tidak terjadi kemunduran, melainkan justru harus ada peningkatan.

Sehingga jangan ada lagi kebijakan yang memperlambat pengembangan sektor industri, yang menjadi salah satu faktor pemicu lahirnya perilaku korup yang melibatkan dunia usaha.

“Hadirnya UU Cipta Kerja telah merepresentasikan se-

mat dan upaya untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi demi mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Misalnya melalui reformasi regulasi di bidang perizinan dalam rangka peningkatan investasi. Sekaligus menutup celah terjadinya korupsi dan mengatasi hambatan dalam berinvestasi, memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPi ini menambahkan, untuk memastikan masa depan perekonomian nasional berjalan dengan baik, KADIN dan Lemhannas akan terus bersinergi. KADIN dan Lemhannas merupakan dua lembaga yang memegang peran kunci dalam menjaga masa depan Indonesia.

Lemhannas sebagai penyelenggara pendidikan, penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional; serta pengkajian permasalahan strategis nasional, regional, dan internasional.

Sedangkan, KADIN sebagai penjaga pertahanan ekonomi nasional. Penjaga ‘perut’ bangsa agar setiap anak bangsa bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena masyarakat yang lapar, bisa menyebabkan kondusifitas bangsa bisa terganggu.

“Melalui kerja sama yang ditandatangani pada hari ini, KADIN bersama Lemhannas juga bisa bekerja sama membuat kertas kerja dalam hal pengkajian di berbagai isu strategis. Antara lain, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, hingga

ketahanan ekonomi kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN),” terang Bamsoet.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, meminta kepada presiden terpilih pada Pilpres 2024 melanjutkan sejumlah program dan kebijakan Presiden Jokowi. Setidaknya ada sembilan program Jokowi yang ia minta dilanjutkan.

Pertama, reformasi struktural terhadap iklim usaha sektoral dan lintas sektoral. Menurut Shinta, kebihan program Jokowi ini perlu dilanjutkan, khususnya agar lebih berorientasi pada peningkatan daya saing manufaktur, ekspor dan penciptaan green/sustainable economy.

Kedua, reformasi birokrasi, khususnya untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, mulus, akuntabel, profesional, dan berorientasi bisnis.

Ketiga, reformasi sumber daya manusia (SDM), khususnya agar struktur skills set pekerja tidak lagi terkonsentrasi pada unskilled workers. “Tetapi pada skilled workers yang dibutuhkan di era industri 4.0 dan digitalisasi ekonomi beserta dengan iklim ketenagakerjaan yang dibutuhkan,” imbuh Shinta.

Keempat, keterbukaan ekonomi strategis yang disertai dengan penyesuaian domestik untuk peningkatan daya saing ekspor nasional dan inbound investasi.

Kelima, target Indonesia maju 2045. Keenam, stabilitas makro ekonomi. Ketujuh, transisi energi dan target nasional determined contribution. Kedelapan, penguatan akses keuangan dan pemberdayaan bagi UMKM. Kesembilan, memastikan mekanisme riil proyek strategis pemerintah (Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan proyek infrastruktur lainnya).

Shinta juga mengungkapkan, APINDO mendukung keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara. Saat ini, pihaknya memberikan dukungan dengan cara membantu pemerintah menarik investasi masuk ke IKN. Apalagi, belakangan investasi dari pengusaha lokal pun sudah masuk.

“Memang kalau kita lihat mau menarik investor asing, mereka melihat investor lokalnya masuk. Jadi di situ kebetulan kami juga ke sana dengan beberapa pengusaha lokal yang melakukan groundbreaking dan itu menunjukkan awal pengusaha lokal berpartisipasi,” jelas Shinta.

Tak hanya itu, dia juga mengatakan APINDO telah menjembatani para investor dengan pengusaha lokal. Menurutnya, pengusaha lokal harus ikut dilibatkan dalam pembangunan IKN.

“Jadi, kami coba untuk memfasilitasi apa kebutuhan dari (investor) apakah itu dari konstruksi, proyek-proyek apa yang mereka bisa bermitra dengan pengusaha lokal juga, ini harus jadi program kita bersama,” pungkasnya. ●RDO





“Kami berorientasi pada ramah HAM atau *human rights friendly*. Karena kalau bicara dalam perspektif HAM, pemilu adalah HAM itu sendiri yang berkaitan dengan hak asasi warga negara”

Idham Holik

PEMILU 2024 RAMAH HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kontestasi Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar.

“Kami merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu dan menciptakan suatu pelaksanaan pemilu yang damai, sejuk, dan juga bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila,” kata Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Dhahana Putra, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2023.

Dia mengatakan bahwa Ditjen HAM memiliki peran konkret dalam menangani isu terkait diskriminasi HAM, utamanya menjelang pesta demokrasi.

Menurut dia, pertemuan bersama dengan komisioner KPU penting dilakukan untuk mencegah pelanggaran perlindungan HAM pada saat pemilu. Pasalnya, ujaran kebencian atau hate speech di media sosial bisa beredar dengan sangat cepat.

“Apalagi tahun politik dan juga akan dilaksanakan proses pemilu. Itulah yang kami jaga bahwa koridor negara Indonesia dan nilai Pancasila harus dijunjung tinggi,” ujarnya.

Dhahana menyebut, dalam satu hari, Ditjen HAM Kemenkumham menerima rata-rata 10 pengaduan terkait dengan pelanggaran HAM yang disampaikan melalui pelayanan komunikasi masyarakat atau Yankomas.

“Bisa bayangkan pada saat pemilu mungkin tambah banyak. Nah, begitu penting kita komunikasi ke KPU,” katanya.

Dia mengatakan, Ditjen HAM juga akan kembali menyampaikan berbagai hal atau masalah pengaduan yang masuk dari masyarakat terkait pelaksanaan pemilu kepada KPU.

Untuk memastikan Pemilu 2024 dapat berjalan aman dan lancar, serta asas pemilihan yang menerapkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat dilaksanakan dengan baik, Ditjen HAM juga akan segera meluncurkan aplikasi Sapa HAM pada 6 November 2023.

“Jadi masyarakat juga tidak perlu ke kami (datang langsung), karena kami memiliki aplikasi, namanya aplikasi Sapa HAM. Ini bisa membantu masyarakat untuk menyampaikan pengaduan HAM melalui Google,” ujarnya.

Dhahana juga mengajak seluruh

masyarakat untuk dapat bersama-sama melaksanakan hak pilihnya dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, asas pemilu, dan menciptakan pemilu yang cerdas.

“Marilah buat pemilu yang cerdas, ini proses demokrasi, kita tidak bisa memaksakan suatu kehendak pribadi, tapi juga menghormati hak-hak orang-orang lain, itu menjadi suatu proses demokrasi yang luar biasa,” katanya.

Selain itu Kemenkumham dan KPU juga sepakat mewujudkan dan meningkatkan kualitas Pemilu 2024 yang ramah terhadap HAM.

“Kami dapat ilmu baru dari KPU, yakni human rights friendly, bahwa pelaksanaan pemilu ke depan itu akan human rights friendly, maksudnya adalah bahwa memperhatikan kelompok rentan, baik vulnerable group ataupun yang lain,” kata Dhahana.

Salah satu hal untuk mewujudkan pemilu ramah HAM tersebut ialah dengan memperhatikan seluruh kelompok masyarakat dan membuat pos khusus seperti di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan).

“Jadi, mereka sebagai warga negara punya hak untuk memilih. Dengan demikian, KPU akan menyiapkan suatu TPS (tempat pemungutan suara) di setiap grup itu (lapas dan rumah tahanan). Inilah sesuatu potret bahwa KPU juga peduli terhadap HAM,” jelas Dhahana.

Audiensi antara Kemenkumham dan KPU itu juga merupakan tindak lanjut dari hasil kerja sama (MoU) antara keduanya di tahun 2022, di mana terdapat dua hal yang menjadi fokus pembahasan, yakni penguatan teknologi informasi dan sosialisasi atau edukasi.

“Kami berterima kasih atas pertemuan ini dan pertemuan ini bukanlah pertemuan

awal, tapi berkelanjutan. Kami juga punya suatu tanggung jawab besar bagaimana bisa melaksanakan pemilu yang baik, terlaksana dengan luber dan damai,” kata Dhahana.

Sementara itu, Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan kunjungan Dirjen HAM Kemenkumham tersebut mempertegas hubungan yang baik antara kedua pihak untuk terus mewujudkan pemilu ramah HAM.

“Kami berorientasi pada ramah HAM atau human rights friendly. Karena kalau bicara dalam perspektif HAM, pemilu adalah HAM itu sendiri yang berkaitan dengan hak asasi warga negara,” katanya.

Menurut dia, KPU dan Kemenkumham juga terus berfokus meningkatkan kualitas pemilu inklusif atau pemilihan umum yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan berpartisipasi setara dalam pemilihan politik.

Hal itu mencakup tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak politik semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas, etnis, agama, atau latar belakang sosial ekonomi, sepanjang para pemilih memenuhi persyaratan.

“Inklusifitas elektoral ini merepresentasikan pada kualitas sejauh mana hak asasi manusia dalam pemilu itu dapat diwujudkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigi, mengatakan, pemilu ramah HAM adalah kesiapan negara menyediakan sarana prasarana, prosedur, dan fasilitas yang dapat digunakan warga negara. Menurut Atnike, fasilitas itu harus bisa diakses setiap warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih pada Pemilu 2024 ini dan seterusnya.

“Negara harus memfasilitasi akses bagi warga di wilayah-wilayah terpencil untuk mengikuti pemilihan,” kata Atnike di Jakarta Pusat, Kamis, 12 Oktober 2023.

Atnike menyatakan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis dan ekonomi-sosial yang beragam. Banyak wilayah dapat diakses dengan transportasi. Tapi ada yang menggunakan transportasi laut demi mengikuti kontestasi pemilu.

Menurut Atnike, ada wilayah yang berada di daerah terpencil, jauh dari jalan raya serta kota-kota besar. “Negara harus memfasilitasi itu, sehingga proses pemilihan dilakukan, bahkan di wilayah-wilayah terpencil,” tutur Atnike.

Dia mengatakan hak-hak penyelenggara pemilu harus terlindungi, baik kesehatan maupun keselamatan. Sehingga tak hanya proses pemilu berjalan lancar, tapi semua orang dapat melakukannya dengan aman.

Dia menjelaskan, pemilu adalah pesta demokrasi yang memberikan ruang kepada warga negara supaya pelaksanaan atau pemenuhan hak politik warga terpenuhi, baik memilih atau dipilih.

Pemilu harus memastikan bahwa setiap orang dapat berpartisipasi secara substantif. Pilihan itu untuk mengusung seseorang sebagai anggota legislative maupun eksekutif, baik di tingkat pusat atau daerah.

●RDO



“Apabila Golkar putar haluan dan bergabung dengan PDIP, mungkin saja Golkar mengejar posisi cawapres dan power sharing dalam kabinet yang lebih besar”

Ade Reza Hariyadi



GOLKAR GABUNG PDIP TERGANTUNG PERINTAH JOKOWI

Partai Golkar diisukan bakal bergabung dengan koalisi PDIP yang mengukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan didukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura.

Kabar tersebut semakin santer terdengar setelah Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, melakukan safari politik dengan bertemu dua politisi senior Partai Golkar, yakni Luhut Binsar Panjaitan dan Jusuf Kalla. Puan mengakui ada tanda-tanda Partai Golkar akan beralih mendukung Ganjar Pranowo, namun dia enggan menjelaskan secara gamblang.

Puan menyampaikan hal itu usai menemui Jusuf Kalla di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Oktober 2023. Dalam pertemuan itu, Puan mengenakan baju batik berkelir kuning, warna khas Partai Golkar.

Saat ditanya apakah pertemuan dirinya dengan Luhut dan JK serta pemilihan baju warna kuning merupakan tanda-tanda bahwa Partai Golkar akan mendukung Ganjar, Puan tak membantah. Kendati begitu, dia meminta awak media untuk menanyakan hal tersebut kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saja.

“Tanda-tanda mungkin ya. Itu (wacana Golkar dukung Ganjar) tanya ke Mas Airlangga ketua umumnya, bukan saya yang harus menjawab,” ujar Puan.

Pengamat komunikasi Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyebut, safari politik Puan Maharani ke senior Partai Golkar, seperti Luhut Binsar Pandjaitan hingga Jusuf Kalla, merupakan sinyal PDIP mengajak Golkar gabung kubu Ganjar Pranowo. Ajakan itu sangat wajar dan realistis, mengingat Ganjar Pranowo belum mendeklarasikan bakal cawapres pendampingnya.

“Kalau kader Golkar ditawarkan posisi cawapres atau jabatan strategis lainnya, tentu masih ada peluang pindah gabung PDIP,” kata Jamiluddin.

Dia mengatakan, peluang Golkar ditawarkan bakal cawapres masih sangat terbuka. PDIP dipastikan akan mengakomodir posisi itu bila Golkar memberikan kader terbaik yang bisa membantu mendongkrak elektabilitas Ganjar.

“Elektabilitas di Jawa Barat hingga kini masih rendah,” kata Jamiluddin.

Karena itu, ia menilai PDIP bisa saja mengajak mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. “Jadi, ada kemungkinan Puan

meminta kepada Luhut dan JK untuk menjadikan Ridwan Kamil sebagai cawapres Ganjar,” ujarnya.

Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi, menilai, peluang bergabungnya Partai Golkar ke koalisi PDIP cukup realistis lantaran posisi KIM saat ini dinilai terlalu gemuk dengan di isi partai besar skala nasional.

Reza juga melihat potensi merapatnya Partai Golkar ke PDIP kemungkinan terjadi lantaran munculnya dinamika di internal koalisi dan tekanan politik yang cukup kuat dalam rangka menghadapi Pemilu 2024.

“Perubahan sikap politik Golkar dapat terjadi jika ada dinamika di internal dan tekanan politik eksternal yang kuat yang dapat mempengaruhi arah kebijakan politik Golkar saat ini yang mendukung Prabowo Subianto dan masuk dalam KIM,” ungkap Reza, Kamis, 12 Oktober 2023.

Kendati demikian, Reza memandang, untuk sementara ini, indikasi politik bergabungnya Golkar ke kubu PDIP tersebut belum terlihat signifikan. Peluang itu bisa jadi muncul apabila ada

tawaran yang menandakan akan adanya perubahan sikap politik Partai Golkar.

Reza menuturkan, munculnya kebijakan Partai Golkar untuk bergabung ke PDIP bisa saja terjadi apabila ada tawaran yang menarik. Misalnya jika ada sala satu kadernya diberikan tempat untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Kondisi itu bisa saja mengubah peta politik Partai Golkar dalam pemetaan terkait ruang dinamika menjelang Pilpres 2024.

“Apabila Golkar putar haluan dan bergabung dengan PDIP, mungkin saja Golkar mengejar posisi cawapres dan power sharing dalam kabinet yang lebih besar,” ucap Reza.

Reza mengatakan, adapun kemungkinan lain mengenai peluang Partai Golkar akan pindah haluan yakni dalam rangka mengamankan posisi kepentingan elite partai beringin di pusaran politik nasional.

Sebab, saat ini, PDIP masih memegang kendali di pemerintahan di bawah naungan Presiden Jokowi. Sehingga, kemungkinan pindahnya arah dukungan Partai Golkar bisa saja terjadi apabila ada pergolakan di internal partai dan ada faktor tekanan dari eksternal.

“Kemungkinan lain juga bisa jadi karena Golkar memerlukan posisi politik yang lebih aman bagi kepentingan politik elite Golkar jika bergabung dengan PDIP,” terang Reza.

“Kemungkinan tersebut kembali pada sejauh mana dinamika internal Golkar dan pengaruh faktor eksternal. Jika kecil, maka peluang Golkar pindah haluan pun akan tipis,” kata Reza.

Analisis politik, Hendri Satrio, menyatakan, Partai Golkar akan pindah haluan ke PDIP jika Presiden Jokowi menginstruksikan untuk bergabung mendukung Ganjar Pranowo. Apalagi, Golkar merupakan partai politik koalisi pemerintah yang taat dengan instruksi Presiden Jokowi dalam menentukan arah 2024.

“Dukungan Golkar bisa dibaca dukungan Jokowi karena Airlangga dicitrakan tegak lurus pada Jokowi,” kata Hensat.

Dia menambahkan, Prabowo akan terancam di 2024 jika Golkar pindah ke PDIP. “Bahaya (bagi Prabowo). Prabowo perlu banyak dukungan bila tidak ingin gagal lagi,” tutupnya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyarankan sebaiknya Golkar tetap berada di KIM. “Yang bagus itu sebaiknya Golkar di Prabowo. Kalau ke PDIP, Golkar terkunci, tidak dinamis dalam konteks di Pileg,” kata Ujang.

Menurutnya, Golkar harus realistis untuk memenangkan Pileg lantaran potensi menjadi cawapres sangat minim dan berada di KIM merupakan langkah tepat untuk mengamankan suara di Senayan.

“Oleh karena itu yang realistis Golkar di Prabowo, itu kan berdasarkan aspirasi kader di bawah, karena kader di bawah paham kalau ke Prabowo, Partai Golkar masih hidup. Paling tidak di pilegnya masih hidup, masih dinamis, masih jalan gerakan Golkar untuk memenangkan di pilegnya,” kata Ujang.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, telah menegaskan partai beringin akan tetap setia dalam KIM. Dia menyebut saat ini tidak ada tanda-tanda partai yang dipimpinnya tersebut memilih untuk pindah haluan ke PDIP.

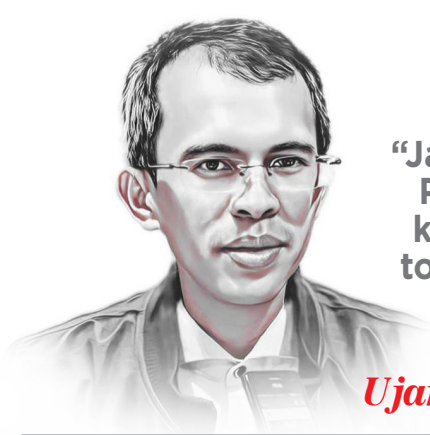
Airlangga pun menanggapi terkait pertemuan Ketua PDIP Puan Maharani dan politikus senior Golkar yakni Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Pandjaitan yang diisukan sebagai pemantik awal bakal bergabungnya partai beringin.

Airlangga menyebut pertemuan antara Puan dengan Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Pandjaitan merupakan hal yang biasa lantaran ketiganya memiliki hubungan yang baik selayaknya teman dan sahabat.

Selain itu, Airlangga menambahkan, saat ini Golkar akan tetap setia bergabung dengan KIM dalam rangka mengukung Prabowo menjadi capres dan akan berkomitmen atas apa yang telah disepakati bersama.

“Artinya kita kan sudah teken-teken,” pungkas Airlangga. ●RDO





“Jadi saya melihatnya kalau di PSI ada yang gabung itu bukan faktor Kaesang, tapi faktor Jokowi. Faktor Jokowi sebagai presiden”

Ujang Komarudin

Bayang-bayang Semu Kaesang

TEMBUSKAN PSI KE PARLEMEN

Optimisme putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, membawa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke parlemen usai didaulat menjadi ketua umum, dianggap sebagai bayang-bayang semu. Sebabnya, dia dinilai tak memiliki modal politik yang cukup mumpuni selain hanya menyandang gelar putra mahkota dari Presiden ketujuh RI.

Pola manuver politik yang digunakan Kaesang menarik perhatian konstituen, salah satunya adalah cara yang digunakan bapaknya saat menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga di periode pertama menjadi Presiden ketujuh RI, yakni blusukan ke daerah-daerah.

Belum lama ini, Kaesang menyambangi wilayah Jawa Barat, tepatnya ke Kota Tasikmalaya, dan membawa gagasan tentang pemimpin yang dibutuhkan sekarang ini adalah dari kelompok muda. Alasan yang dipakainya adalah menyebut komposisi jumlah penduduk Indonesia saat ini didominasi kelompok milenial dan generasi Z (Gen Z).

“Jadi, kami ingin menciptakan pemimpin dari milenial dan generasi Z agar masalah milenial dan generasi Z terselesaikan. Kami akan rumuskan membuka lapangan pekerjaan selebar-lebarnya supaya anak yang baru lulus bisa langsung kerja,” ujar Kaesang dalam kegiatan diskusi bertajuk Ngesang (Ngopi Bareng Kaesang) di Kebon Djati Eatery, Kecamatan Indhiang, Kota Tasikmalaya, Senin, 9 Oktober 2023.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, berpendapat, Kaesang hanya punya satu magnet dalam dunia politik saat ini, yaitu putra Jokowi. Menurutnya, hal itu tidak menjadi modal yang cukup untuk menembuskan PSI mendapat jatah kursi parlemen di Senayan untuk mewakili rakyat. Bahkan, dia memandang, fenomena banyaknya elite politik yang bergabung ke PSI juga bukan karena Kaesang menjadi ketua umum.

“Kalau saya sih melihatnya bukan karena Kaesangnya, tapi karena Jokowi. Lihat saja di spanduk-spanduk, banyak daerah yang kemarin saya ke Bandung itu memperlihatkan PSI milik Jokowi. Jadi saya sih melihatnya kalau di PSI ada yang gabung itu bukan faktor Kae-

sang, tapi faktor Jokowi. Faktor ayahnya, faktor Jokowi sebagai presiden. Kalau Kaesang bukan anaknya Jokowi enggak bakal ada yang mau itu di PSI, dan dia tidak akan juga jadi ketua umum begitu,” kata Ujang kepada Info Indonesia, Kamis, 12 Oktober 2023.

Upaya menembus parlemen dengan syarat memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen, juga diupayakan Kaesang dengan ikut bermanuver dalam percaturan politik Pilpres 2024. Sebab, dia belakangan hari ini mendekati ke sosok bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

“Oleh karena itu, saya melihat, soal pengaruh elektoral itu kalau murni kerja keparaiannya, kerja elektoralnya sulit kalau hanya mengandalkan Kaesang. Tapi kalau mengandalkan Jokowi, misalkan relawan Jokowi suruh ke PSI, lalu pendukung Jokowi ke PSI,” tuturnya.

Selain itu, Ujang juga meyakini adanya kemungkinan lain yang bisa menjadi alat Kaesang mendongkrak perolehan suara PSI, yaitu terkait dengan faktor non elektoral seperti memanfaatkan power atau kekuatan bapaknya yang masih menjabat presiden saat Pemilu Serentak 2024 berlangsung pada 14 Februari.

“Artinya faktor non elektoral itu misalkan menggunakan perangkat penegak hu-

kum untuk menaikkan elektabilitas PSI. Itu kan bisa dilakukan oleh seorang presiden. Dan itu kan bukan rahasia umum lagi dari setiap rezim, dari setiap pemerintahan melakukan faktor-faktor non elektoral itu untuk menaikkan elektoral partai politik,” urainya.

Dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu menegaskan, kerja-kerja politik murni PSI bakal sulit untuk bisa menaikkan elektoral PSI, namun ada kerja-kerja lain. Ada kerja non elektoral yang digunakan untuk bisa menaikkan elektoral PSI secara politik melalui strategi belakang layar.

Termasuk, menjadikan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI yang makin membenarkan dugaan PSI disokong penuh oleh Jokowi sejak Pemilu 2019. Apalagi, dalam beberapa kali kesempatan bepergian ke daerah, Ujang mendapati pesan-pesan politik di spanduk-spanduk PSI yang menegaskan kepemilikan partai berlabang bunga mawar itu.

“Kalau kemarin kan belum terang-terangan karena masih panjang pemerintahan Jokowi, lalu masih di PDIP. Sekarang sudah terang-terangan karena di ujung masa jabatan terakhirnya Jokowi, jadi memang Kaesang di PSI gitu. Jadi saya melihat ya memang itu partainya Jokowi, jadi bukan hanya dapat dukungan ke Jokowi, ya pasti disokong oleh Jokowi,”

apalagi Kaesang anaknya Jokowi,” terangnya.

Dengan posisi Kaesang memimpin PSI, Ujang menduga cara-cara yang tidak sehat akan digunakan untuk bisa tembus ke parlemen. Dia memandang, kedudukan Kaesang akan menentukan citra baik Jokowi dalam dunia politik. Sehingga target memenuhi parliamentary threshold 4 persen akan diupayakan dengan memanfaatkan kekuasaan yang masih di tangan Jokowi.

“Jadi secara kasat mata dan secara harga diri pun, ya pasti akan mati-matian. Jadi akan menggunakan apapun cara untuk bisa menaikkan elektabilitas dari PSI, dan katakanlah menaikkan perolehan suara di Pileg 2024 nanti,” katanya.

Ujang juga menduga PSI akan menjadi alat pencalonan putra sulung Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka yang kini masih menjabat Wali Kota Solo. Pasalnya, terdapat uji materiil norma batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga akan memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto.

“Pasti lah kalau Gibran yang jadi cawapres Prabowo, ya udah pasti Kaesang ke Prabowo. Ayah, anak-anaknya yang dua orang itu, Gibran dan Kaesang dipastikan akan mendukung pencapresan Prabowo,” kata Ujang.

Dia menambahkan, hal itu akan berlawanan dengan PDIP yang merupakan partai penyokong Jokowi dan anak-anak serta menantunya menjadi pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Itu akan ditabrak, akan dilawan ya ketika misalkan kiblatnya (Gibran) menjadi cawapresnya Prabowo. Ini sebenarnya desain. Jadi bukan karena Golkar dan PAN kalah saing, bukan, Tapi ini soal pemberitaan, karena semuanya, baik Kaesang maupun Gibran anaknya Pak Jokowi,” tuturnya.

“Kalau dia bukan anaknya Jokowi, dua-duanya sudah banyak yang melibas, sudah banyak yang mengalahkan, sudah banyak yang ngerjain. Mungkin seperti itu. Kalau saya melihatnya begitu. Karena kan politik itu kan saling mengerjai, saling menyandera, saling tikam, saling baku hantam, walaupun di depan kadang-kadang sering rangkulan begitu,” tutup Ujang.

• RDO





JOKOWI-MEGA RENGANG GEGARA GIBRAN DAN KAESANG

Hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, disebut-sebut merenggang belakangan. Hal itu dipicu manuver politik yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu melalui anak-anaknya hingga relawan.

Putra sulung Jokowi yang juga Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, saat ini tengah jadi sorotan karena digadang-gadang sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Bahkan, dukungan agar Gibran maju di Pilpres 2024 muncul lewat gugatan uji materi batas usia capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun di Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah Gibran, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarap, kini menjadi Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai berlambang mawar ini belakangan tengah intens Bersama Prabowo Subianto dan Koalisi Indonesia Maju.

Sejauh ini, PDIP maupun Megawati masih diam terkait manuver Jokowi dan anak-anaknya. Namun, banyak yang memprediksi bahwa PDIP tak ingin ada ketegangan dengan Presiden Jokowi jelang Pilpres 2024. Meski begitu, Megawati tentunya bakal mengambil tindakan terhadap Jokowi dan anak-anaknya jika akhirnya mereka melabuhkan dukungan kepada Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo.

Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, mengatakan, peluang PSI untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 sangat terbuka. Apalagi, jika Gibran Rakabuming dipilih menjadi calon wakil presiden.

“Jika Prabowo menggendong Gibran sebagai cawapres, peluang PSI mendukung Prabowo sangat terbuka,” kata Yusak kepada Info Indonesia, Kamis, 12 Oktober 2023.

Dia menjelaskan, Gibran dan Kaesang sejatinya tidak dapat dipisahkan, meskipun keduanya berbeda partai. Sementara itu, keduanya juga merupakan trah dari Presiden

Jokowi.

Jadi, Gibran dan Kaesang mewakili kekuatan politik Presiden Jokowi. “Gibran dan Kaesang itu satu paket, sama-sama merepresentasikan kekuatan politik Jokowi,” ujar Yusak.

Dia merasa aneh jika Kaesang maupun PSI tidak mendukung Gibran jika menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apalagi, jika PSI malah mendukung pencapresan Ganjar Pranowo.

“Jadi agak sulit diterima nalar sehat jika Kaesang-PSI tidak mendukung Gibran. Kalau PSI dukung Ganjar, sementara Gibran jadi cawapresnya Prabowo, maka justru aneh,” jelas Yusak.

Dia menerangkan, dinasti politik yang dibentuk Presiden Jokowi itu untuk mengamankan kepentingannya di 2024. Apalagi, sebentar lagi Jokowi tidak lagi duduk di kursi kekuasaan.

“Jokowi bermanuver membentuk klan politik kan salah satunya untuk menyelamatkan kepentingan politik anak-anaknya,” kata Yusak.

Dia mengatakan, akan terjadi perang dingin antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, jika PSI dan Kaesang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

“Maka bisa dikatakan sedang terjadi pertarungan terbuka antara Jokowi dengan Megawati,” kata Yusak.

Dekan FISIP Universitas Sutomo itu menyampaikan, ketegangan hubungan antara Jokowi dengan Megawati akan mencapai klimaks jika duet PSI dan Kaesang benar-benar mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

“Relasi politik Jokowi-Mega semakin memburuk dan men-

capai klimaksnya pada titik tersebut,” jelas Yusak.

Lebih lanjut, Yusak menilai, Megawati sebagai pucuk pimpinan PDIP pastinya akan mengambil langkah. Sebab, Gibran merupakan kader dari PDIP.

Sementara itu, Presiden Jokowi tentunya sudah mempersiapkan segala macam cara dan bakal menerima konsekuensinya jika PSI bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Tentu Mega akan mengambil sikap terkait posisi Gibran di PDIP. Dan saya kira Jokowi sudah berhitung konsekuensinya,” kata Yusak.

Dia mengungkapkan, pilihan terakhir bagi Jokowi sebenarnya lebih baik mendukung Prabowo Subianto. Sebab, pertarungan antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo sangat terbuka di Pilpres 2024.

“Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi Jokowi kecuali all out memenangkan Prabowo karena pertarungannya dengan PDIP sudah terbuka,” ujar Yusak.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, menilai, partai pimpinan Kaesang Pangarep akan mendukung pencapresan Prabowo Subianto.

“Besarnya kemungkinan PSI mendukung. Sebab, seperti diketahui saat ini ketum PSI adik kandung dari Gibran, Wali Kota Solo,” kata Iwan.

Dia berpendapat, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran merupakan kombinasi yang sangat lengkap. Setidaknya, pasangan ini akan sangat mudah untuk merebut suara generasi muda.

“Tidak hanya itu, spirit memasang-

Gibran dengan Prabowo ialah keterwakilan anak muda (Gen Z dan milenial) usia produktif yang akan menjadi mayoritas penduduk Indonesia,” kata Iwan.

Apalagi, kini sudah banyak yang muncul relawan, bahkan dari internal Partai Gerindra yang mendukung duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

“Sudah mulai pula muncul dukungan dan deklarasi dukungan duet Prabowo-Gibran dari GMI (Gerakan Milenial Indonesia) simpatisan sekaligus relawan pemenangan Prabowo di 2019,” jelas Iwan.

Di samping itu, dukungan yang semakin kencang terhadap duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming membuat gerah PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri.

“Dengan posisi dua anak Presiden Jokowi berada di kubu Prabowo, tentu ini berpotensi merenggangkan hubungan Jokowi dan Megawati,” kata Iwan.

Dia mengatakan, kerenggangan antara Presiden Jokowi dengan Megawati itu akan terjadi, meski Kaesang Pangarep sempat bertemu dengan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR, Puan Maharani.

Dia memprediksi, meskipun Kaesang sudah bertemu dengan Puan, akan tetapi peluang PSI untuk mendukung Prabowo sangat besar.

Hal itu terlihat ketika beberapa kali agenda Koalisi Indonesia Maju, PSI selalu mengahadirinya. Selain itu, pada saat Koalisi Indonesia Maju deklarasi, petinggi PSI juga terlihat hadir.

Iwan melihat hal itu menjadi sinyal yang kuat dari PSI sangat mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Hal ini pula yang menjadi kemelut dari kerenggangan antara Jokowi dengan Megawati.

“Kendati sebelumnya Kaesang dan PSI telah bersilaturahmi dengan Puan, namun keberpihakan keluarga Jokowi kepada capres selain Ganjar berpotensi merenggangkan hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega,” kata Iwan.

Dia menuturkan, jika Gibran dijadikan cawapres oleh Prabowo Subianto, mau tidak mau Wali Kota Solo itu harus hengkang dari PDIP. Sebab, PDIP secara resmi sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres.

Di samping itu, PDIP juga tidak akan mau mengungsi Gibran Rakabuming menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Peluang Gibran jadi cawapres sangat besar di Koalisi Indonesia Maju.

“Bisa jadi karena jika Gibran dicalonkan sebagai cawapres Prabowo, artinya Gibran tidak lagi bisa menjabat sebagai kader PDIP. Sebab, berbeda koalisi dengan Gerindra, dan berbeda pula capres yang diusung,” tandas Iwan. •RDO





“Suara rasional pasti ada karena ada penduduk yang ingin mencari wakilnya bisa memikirkan kebutuhan dan aspirasi mereka”

Wawan

INFO
PILEG

Minggu III • Oktober 2023

23

MENDULANG SUARA RASIONAL DI TENGAH TRANSAKSIONAL

Banyaknya peserta calon legislatif yang ikut di kontestasi pemilihan legislatif (Pileg) membuat peluang menjadi pemenang terbilang sangat kecil. Meski demikian para peserta terus bersaing memperebutkan suara agar bisa duduk di kursi legislatif yang peluangnya sangat kecil.

Untuk meraih peluang tersebut ada banyak cara yang dilakukan. Cara mudah dan instan tentu dengan melakukan politik transaksional meski resiko dan modal yang dikeluarkan juga sangat besar. Disisi lain masih ada suara-suara rasional yang jumlahnya mungkin tidak besar namun bisa menentukan.

Para calon anggota legislatif (caleg) DPR, DPRD dan DPD di Pemilu 2024 berharap suara pemilih rasional maksimal atau lebih banyak, dibandingkan dari suara swing voter dan suara tradisional.

Caleg DPRD Kota Palembang Partai Gerindra, Wawan merasa yakin pada Pemilu 2024 suara rasional masih ada walaupun bisa saja kalah dari swing voter.

“Suara rasional pasti ada karena ada penduduk yang ingin mencari wakilnya bisa memikirkan kebutuhan dan as-

pirasi mereka,” kata Caleg Dapil 6 wilayah Seberang Ulu I, Kertapati dan Jakabaring.

Suara swing voter diprediksikan bisa sangat banyak karena faktor kesulitan ekonomi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Dia mengantisipasi penduduk berpenghasilan rendah berdampak kepada kebutuhan pribadi mereka.

“Kalau sudah jadi kagek lupo (nanti lupa), alasan itu mereka berpikir tidak mau rugi dengan mau memilih asal dikasih sesuatu seperti sembako dan uang. Jadinya sama saja mereka menjual suaranya kebanyakan dari penduduk yang berpenghasilan rendah tersebut,” jelasnya.

Suara rasional masih ada disebutkan dari penduduk yang tingkat pendidikan dan ekonominya sejahtera. Mereka memilih karena alasan rasional tanpa ada iming-imingi tertentu.

“Berpendidikan dan ekonomi tidak bermasalah biasanya mereka adalah suara rasional. Pemilih itu mereka pasti ada figur dan pilihan yang dilihatnya dari visi dan misi serta portofolio atau track record,” ungkapnya.

Untuk tingkat pendidikan Wawan menjelaskan mahasiswa sudah bisa menjadi pemilih rasional karena selain memiliki wawasan juga ekonomi keluarga yang cukup.

“Mahasiswa, S1 dan seterusnya itu pasti pemilih rasional karena mereka tadi tidak akan mau memilih karena iming-imingi,” kata dia.

Menurutnya caleg memberikan sembako boleh-boleh saja karena dia sendiri melakukan itu. Na-

mun pemberian itu bukan untuk membeli suara, lebih kepada kepedulian dan tidak ada maksud politik sehingga terjadi money politik.

Ditambahkannya untuk menunjang performa pencalonan nanti dia sudah mempersiapkan dana untuk akomodasi dengan jumlah fantastis hingga mencapai Rp 1 miliar.

Keyakinan yang sama disampaikan Caleg DPR RI Partai PKB Momon Wahyu-di yang menilai suara rasional pasti masih ada karena pemilih sekarang bisa lebih bijaksana. Hal ini akibat efek dari kemajuan zaman di era digitalisasi yang mendukung kondisi tersebut.

“Saya rasa pemilih rasional di Pemilu 2024 masih ada dan banyak karena pemilih sekarang bisa memanfaatkan media sosial untuk meleak politik dan melihat figur yang mereka pilih. Dari sana mereka bisa menentukan pilihan terbaik secara rasional,” jelasnya.

Momon membantah kalau pemilih yang menentukan pilihan labil baru memilih dengan iming-imingi ada banyak. Dia lebih berharap dan memaksimalkan konstituen pemilih rasional.

“Kenapa karena sampai sekarang dan nantinya saya tidak akan mengeluarkan dana pribadi. Aku masih percaya pemilih rasional tetap me-

menangkan Pemilu 2024,” ungkapnya.

Soal biaya transportasi dan pencetakan alat kampanye Momon menuturkan dia akan melakukan upaya mencari bantuan baik dari sponsor dan mi-

tra yang dijalin selama ini.

“Untuk itu saya ada teman, rekan kerja yang siap membantu. Makanya saya lebih memaksimalkan visi dan misi saya kedepan dibandingkan menggunakan sembako dan sebagainya,” kata Caleg Dapil Sumsel 1 wilayah Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara ini.

Dia menyebutkan visi dan misi adalah untuk mewujudkan amanah rakyat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pelayan.

“Wakil Rakyat itu sama seperti babu! Saya akan melakukan itu bekerja untuk rakyat itu saja visi dan misi saya,” jelasnya.

Dia berharap kepada masyarakat dan para konstituen untuk cerdas dalam memilih tidak terpengaruh dengan money politik dan sembako. Kondisi tersebut membuat bangsa Indonesia akan terpuruk karena dipimpin oleh orang yang tidak tepat.

“Selain itu jangan tidak memilih karena hak suara itu harus digunakan. Banyak juga penyelewengan suara efek dari suara yang tidak dipakai dan dimanipulasi. Kalau kita tidak memilih nanti orang yang tidak layak akan terpilih, sebab satu suara itu menentukan masa depan bangsa. Pemilu 2024 nanti jangan sampai 80 persen suara harus tersalurkan sebanyak 100 persen jangan golput,” pungkasnya.

Caleg DPRD Provinsi Sumsel Partai PKS Masagus Ahmad Fauzan menjelaskan suara rasional masih tetap ada dengan faktor pendidikan dari pemilih. Mereka itu bisa melihat para calon dari rekam jejak dan track record.

“Saya yakin pemilih rasional tetap ada karena generasi Z masih kuliah mereka lebih meleak politik dengan informasi yang lebih maju,” kata Caleg Dapil Sumsel I wilayah Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Kertapati, Plaju, Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat I dan Ilir Barat 2 ini.

Dia sebagai cicit Ki Marogan tidak akan menerapkan politik uang atau money politik. Memiliki niat untuk menjalankan sekaligus meluaskan syiar agama di pemerintahan dan penduduk itu menjadi visi dan misinya.

“Saya jadi Caleg untuk kepentingan syiar agama jadi tidak akan melakukan yang tidak baik untuk politik di pemilu nanti. Saya juga tidak mempersiapkan uang apapun mencetak alat kampanye dengan bantuan mitra dan teman saja,” kata Pimpinan dan Pendiri Pesantren Ki Marogan ini.

Dia berharap kepada pemilih rasional bisa menentukan pilihan juga dengan bijaksana. Kondisi itu diharapkannya jangan sampai tergo da dengan uang yang tidak seberapa.

“Hanya uang Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu jadi demokrasi dan iman tergada i demi kepentingan sesaat saja. Masyarakat harus semakin cerdas merubah iklim demokrasi melalui pemilu 2024 yang lebih baik,” pungkasnya.

●RDR



“Kenaikan tertinggi dalam rentang periode survei ada pada Prabowo Subianto 5,7 persen, disusul Anies Baswedan 3,0 persen, lalu Ganjar Pranowo 1,6 persen”

Arya Budi



PRABOWO KUASAI JABAR DAN JATIM

Indikasi kemenangan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) menguat dari hasil survei terbaru Poltracking Indonesia. Salah satu faktor pendukung suara adalah sosok calon wakil presiden.

Direktur Riset Poltracking Indonesia, Arya Budi, menjelaskan, Prabowo unggul dari dua capres lainnya yang diusung gerbong berbeda, yaitu Ganjar Pranowo yang diusung Koalisi PDIP dan Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan.

“Pada simulasi surat suara tiga nama capres kuat saat ini, Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas 38,9 persen, diikuti oleh Ganjar Pranowo 37,0 persen, dan Anies Baswedan 19,9 persen,” ujar Arya dalam jumpa pers virtual yang diakses ulang Info Indonesia melalui kanal Youtube Poltracking Indonesia, Kamis, 12 Oktober 2023.

Menurut Arya, tren terbaru elektabilitas tiga capres menunjukkan baik Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo cenderung mempunyai kenaikan tren elektabilitas. Kenaikan Prabowo Subianto cenderung konsisten, sementara Ganjar Pranowo lebih fluktuatif.

Sementara itu, tren elektabilitas Anies Baswedan cenderung mengalami penurunan sejak deklarasi pencapresan pada Oktober 2022, meskipun mengalami kenaikan kembali sejak deklarasi capres-cawapres pada awal September 2023.

“Kami juga melakukan survei di bulan Juli ini, praktis tiga capres yang menjadi tiga poros utama sampai hari ini itu mengalami kenaikan. Tapi kenaikan itu bervariasi. Misalnya, di Prabowo kenaikannya ada di sekitar angka 1,4 persen, kemudian di Ganjar kenaikannya ada di angka sekitar 1,1 persen. Kemudian yang agak lumayan Anies Baswedan, itu kenaikannya di angka 4 persen atau lebih,” urainya.

Menariknya, Arya menyebutkan hasil survei dengan simulasi head-to-head antara para capres. Hasilnya, simulasi pertama adalah duel antara Anies Baswedan yang tercatat kalah dari Ganjar Pranowo yang unggul dengan elektabilitas 47,5 persen,

sedangkan Anies Baswedan hanya 30,7 persen.

Sedangkan pada simulasi head-to-head Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto, yang tercatat unggul adalah Prabowo dengan elektabilitas 51,2 persen, sedangkan Anies Baswedan 28,3 persen. Sementara, duel Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto mencatatkan keunggulan Menteri Pertahanan itu dengan elektabilitas 46,1 persen, sedangkan Ganjar Pranowo 39,8 persen.

Pada simulasi tiga pasangan potensial capres-cawapres, Prabowo Subianto dipasangkan dengan Erick Thohir yang unggul daripada dua pasangan lainnya, karena memperoleh angka elektabilitas 32,1 persen. Sedangkan, pasangan Ganjar Pranowo-Sandiaga Salahuddin Uno mencatat elektabilitas 30,3 persen dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya 19,6 persen.

Pada simulasi berikutnya, Prabowo yang awalnya unggul dari dua pasangan capres-cawapres lainnya, justru tercatat lebih rendah jika dipasangkan dengan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Pasangan itu di bawah Ganjar Pranowo yang disimulasikan menggandeng Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

“Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh angka elektabilitas 31,6 persen, diikuti Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 30,7 persen dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 18,4 persen,” sambungnya.

Pada simulasi ketiga, Ganjar Pranowo

pasti berpasangan dengan Muhaimin Iskandar hanya mendapat 18,9 persen.

Selain survei nasional yang menunjukkan peta elektoral sosok-sosok capres maupun cawapres baik secara individu maupun ketika berpasangan, juga dipetakan tingkat keterpilihan sosok-sosok yang sama khusus di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Perbedaan mencolok terlihat di Jawa Barat, antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Pada simulasi surat suara 3 nama capres, Prabowo Subianto memperoleh angka elektabilitas 44,2 persen, jauh di atas dua kandidat lainnya yaitu Anies Baswedan 25,0 persen dan Ganjar Pranowo 21,8 persen.

“Namun demikian, tren elektabilitas ketiga kandidat cenderung naik. Kenaikan tertinggi dalam rentang periode survei ada pada Prabowo Subianto 5,7 persen, disusul Anies Baswedan 3,0 persen, lalu Ganjar Pranowo 1,6 persen,” papar Arya.

Pada simulasi 11 cawapres, nama Ridwan Kamil memperoleh angka tertinggi dengan elektabilitas 30,4 persen, diikuti Erick Thohir 14,5 persen yang disusul oleh salah satu cawapres Prabowo. Sementara, kandidat cawapres Prabowo lainnya, seperti Gibran Rakabum-

ing Raka hanya memperoleh keterpilihan 3,1 persen, Khofifah Indar Parawansa 0,5 persen, serta Agus Harimurti Yudhoyono 8,1 persen.

Adapun cawapres Anies Baswedan yang menjabat Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, memperoleh elektabilitas 13,0 persen. Sedangkan sosok yang digadang-gadang menjadi cawapres Ganjar Pranowo, yakni Sandiaga Salahuddin Uno mencatatkan elektabilitas 9,1 persen dan Mahfud MD 3,2 persen.

Untuk hasil survei khusus di Jawa Timur, Poltracking Indonesia mencatat nama Ganjar Pranowo berada di urutan kedua sebagai sosok paling dominan sebagai capres di bawah Prabowo Subianto. Karena, Prabowo Subianto memperoleh angka elektabilitas 40,6 persen, diikuti Ganjar Pranowo 38,2 persen dan Anies Baswedan 13,6 persen.

Pada simulasi nama cawapres, Erick Thohir memperoleh elektabilitas 19,8 persen. Sedangkan di urutan selanjutnya ada nama Mahfud MD 15,2 persen, Muhaimin Iskandar 14,7 persen, dan Khofifah Indar Parawansa 13,7 persen.

Tiga survei berbeda dari Poltracking Indonesia itu dilaksanakan pada rentang waktu di September hingga awal Oktober 2023, menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah responden dalam survei yang dilakukan secara tatap muka ini adalah 1.000 orang, dengan margin of error +/- 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. •RDO

di-
pasang-
kan dengan
Sandiaga Salahud-
din Uno memperoleh an-
gka elektabilitas 31,9 persen,
diikuti Prabowo Subianto-Gi-
bran Rakabuming Raka 30,9
persen, sementara Anies
Baswedan yang sudah

